



VAKSIN  
AMAN dan HALAL



# RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021 - 2026

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan wajib menyusun dokumen perencanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dokumen Renstra ini menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana aksi *Stakeholders* jajaran kesehatan khususnya wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 mencakup perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan 2 (dua) UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang dan RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 khususnya pada Tim Penyusun Renstra dari RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Engku Haji Daud. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan kita kemudahan dalam mewujudkan Kepulauan Riau Sehat Mandiri dan Berkeadilan.

Tanjungpinang, 15 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

The image shows a circular official stamp of the Provincial Health Office of Kepulauan Riau. The text around the border reads "PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU" and "DINAS KESEHATAN". In the center, there is a handwritten signature in blue ink.

MOH. BISRI, SKM, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19710109 199501 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>SK TIM PENYUSUN .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU .....</b>	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau .....	9
2.2. Sumber Daya .....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	49
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	53
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	54
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 .....	56
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	59
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	60
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	66
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	66
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	72
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	72
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	74
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	77

<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>78</b>
8.1.	Pedoman Transisi.....	78
8.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	78

## **LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b>	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan RSUD Provinsi Tahun 2021-2026
<b>Lampiran 2</b>	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
<b>Lampiran 3</b>	: Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2021-2026
<b>Lampiran 4</b>	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau RSUD Engku Haji Daud Tahun 2021-2026
<b>Lampiran 5</b>	: Definisi Operasional Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## DINAS KESEHATAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  
Gedung C2 Lantai 2 dan 3 Dompok Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau  
Email: mail@dinkesprovkepri.org Website: dinkes.kepriprov.go.id

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Nomor : 1733/SK-Dinkes/X/2021

#### TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

#### KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa kebutuhan ketersediaan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan;
  - c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 perlu membentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.11);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri no 050 – 3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014-2024.
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

## **M E M U T U S K A N**

### **Menetapkan:**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sebagaimana yang disebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 di bebaskan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MOH. BISRI, SKM, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.19710109 199501 1 001



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau  
Nomor : 1733/SK-Dinkes/X/2021  
Tanggal : 18 Oktober 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021**

- I. PELINDUNG/PEMBINA** : GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
- II. PENANGGUNG JAWAB** : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU
- III. PENGARAH** :
- |         |   |                                    |   |
|---------|---|------------------------------------|---|
| Ketua   | : | Hj. MARDIANTI, SE, MAP             | ( Kabid Sumber Daya Kesehatan)                            |
| Anggota | : | dr. Hj. SULASTRI, M.Si             | ( Kabid Pelayanan Kesehatan)                              |
|         |   | dr. YOSEI SUSANTI M.A.P            | ( Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)             |
|         |   | SUSILO BUDI HARTANTO , S.Si, Apt   | (Kabid Kesehatan Masyarakat)                              |
|         |   | Dr. dr.H.A. YUSMANEDI, MMRS, Sp.EM | ( Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau) |
|         |   | dr.KURNIAKIN WS. GIRSANG Sp.PD     | ( Direktur RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau)  |
- IV. PELAKSANA**
- |         |   |                          |   |
|---------|---|--------------------------|---|
| Ketua   | : | H. LUDI HARMAN,S.Sos, MM | (Kepala Sekretariat)                                    |
| Anggota | : | NOVARITA, SKM,M.Epid     | (Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi)                     |
|         |   | RIEZKY YULVIANI          | (Analisis Data dan Informasi)                           |
|         |   | ARMANITA, SKM, M.S.E     | (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)          |
|         |   | DESI YERI M, SKM         | (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)          |
|         |   | GATOT YUNANTO, SKM       | (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)          |
|         |   | JEF SAGITA RANDA, S.KL   | (Pembantu Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) |
|         |   | JUMADI, SKM              | (Pembantu Analisis Data dan Informasi)                  |
|         |   | SYELFIN AKBAR FAJAR, SH  | (Pembantu Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) |
|         |   | DESNIATI, SE             | (Pembantu Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran)     |

NAILI AMALIA, SKM	(Pembantu Analis Data dan Informasi)
LIDYA OKTARINA KURNIA PUTRI, S.Sos	(Pembantu Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

**V. PERUMUS**

: NOVARITA, SKM,M.Epid	(Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi)
TRI HARDIONO ERWIN, SE, MM	(Kasubbag Keuangan dan Aset)
YESSI ERFANA, Amd.Keb	(Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
ELFRIDA TAMBUN, SKM, MPH	(Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan)
HERIYANTO, AMK	(Kasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
GENTA YANANTHA, S. Farm, Apt, M.Si	(Kasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
Hj. TITIK NURANI, SKM, MPH	(Kasi Pelayanan Kesehatan Primer)
FENTY OCTRIANA, AMK	(Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional)
ANDI KURNIAWAN, SKM, MPH	(Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan)
ASMALI, SKM, M.Si, MPH	(Kasi Kesling, Kesjaor)
ANIESAPUTRI JUNITA, SKM, MPH	(Kasi Kesga dan Gizi Masyarakat)
dr. INDRIKE CAESARIA	(Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)
Hj. AKHTIKA,S.Si, Apt	(Kasi Surveilans dan Imunisasi)
dr. RAJA DINA ISWANTY	(Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular)
ABDUL RAUF RAHIM, SKM, M.Si	(Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa)

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MOH. BISRI, SKM, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.19710109 199501 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Urusan kesehatan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan di daerah, urusan kesehatan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan telah terpilihnya Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin Agustina yang secara resmi dilantik pada 25 Februari 2021 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, maka telah disusun juga Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sesuai dengan waktu terpilihnya maka Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih berada pada periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

Menindaklanjuti hal ini, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

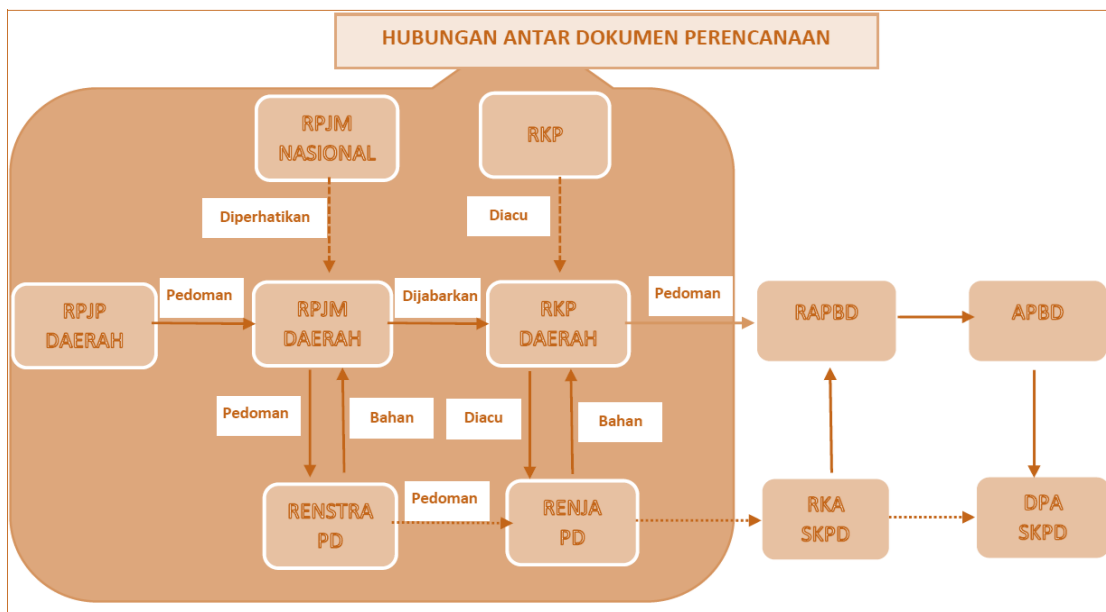
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu bentuk upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Hubungan antara renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar berikut:



Penyusunan Renstra merupakan penjabaran Visi, Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya***" maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab dalam menjalankan misi ke-tiga yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014-2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dengan memadukan dan menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
2. Merumuskan arah pembangunan kesehatan sebagai acuan bagi pengembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kota.
3. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan program/ kegiatan tahunan yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.
4. Sebagai tolak ukur terhadap dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai berikut :

- Bab I       Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- Bab II       Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan.
- Bab III       Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, telaahan visi-misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu strategis.
- Bab IV       Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- Bab V       Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- Bab VI       Rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berisi tabel rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII       Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII      Penutup berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Lampiran

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

#### **2.1.1. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

#### **2.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur.

### **2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi bidang dijabarkan sebagai berikut:

#### **1) Sekretariat**

- Tugas : melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- Fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - c. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
  - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
  - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  - f. Pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  - h. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- i. Pelaksanaan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- j. Pelaksanaan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- l. Perencanaan operasional, mengontrol dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- m. Pemberian petunjuk dan arahan serta mengevaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan, pendataan dan pelaporan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 2) Bidang Kesehatan Masyarakat

- Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



### 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi.
- Fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi;
  - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi; dan
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 4) Bidang Pelayanan Kesehatan

- Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- Fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

- Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- Fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
  - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **2.1.3.1. Tugas dan Fungsi RSUD Raja Ahmad Tabib**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pembentukan UPT Dinas Kesehatan, bahwa tugas dan fungsi UPTD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

##### 1. Tugas UPTD RSUD Raja Ahmad Tabib

UPTD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya

rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi UPTD RSUD Raja Ahmad Tabib

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian/Bidang;
- d. Sub Bagian/Seksi
- e. Satuan Pemeriksaan Internal;
- f. Komite;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Instalasi; dan
- i. Unit.

## 1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, menetapkan kebijakan teknis program, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit serta ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
- c. membina arahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang yanmedik dan keperawatan;
- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang penunjang dan Pendidikan Pelatihan;
- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bagian umum dan keuangan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
- i. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan secara efektif, bermutu dan efisien di fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungannya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Pelayanan

Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait pelayanan medik;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait keperawatan;
- g. menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Pelatihan

Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Penunjang dan Pendidikan Pelatihan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Penunjang dan Pendidikan Pelatihan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Penunjang dan Pendidikan Pelatihan;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penunjang dan Pendidikan Pelatihan;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait penunjang medik dan non medik;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- g. menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan penunjang dan Pendidikan Pelatihan;
- h. pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian dengan instalasi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pengembangan pelayanan penunjang, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penunjang dan Pendidikan Pelatihan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Penunjang dan Pendidikan Pelatihan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan umum, kesekretariatan, perencanaan dan keuangan serta fasilitas- fasilitas/instalasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Umum dan Keuangan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Umum dan Keuangan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Umum dan Keuangan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan umum dan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait administrasi umum;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait perencanaan;



- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait keuangan;
- h. menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Umum, Perencanaan dan Keuangan;
- i. menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
- j. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
- k. penyusunan, pemantauan dan pengembangan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, instalasi SIM RS dan instalasi lainnya;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Umum, Perencanaan dan Keuangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **2.1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang RSUD Engku Haji Daud**

Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian/Bidang;
- c. Sub Bagian/Seksi
- d. Komite;
- e. Satuan Pemeriksaan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Instalasi; dan
- h. Unit.

Tugas pokok dan fungsi bidang RSUD Engku Haji Daud :

#### **1. Direktur**

Direktur mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Tata Usaha, Pelayanan, Keperawatan dan keuangan rumah sakit. Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Engku

Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- c. membina bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bagian tata usaha;
- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pelayanan;
- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang keperawatan;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang keuangan;
- i. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud;
- j. melaksanakan pengendalian pengelolaan sumber daya rumah sakit;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- l. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan dan evaluasi program, umum kepegawaian dan humas, administrasi rekam medik. Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di Lingkungan Bagian Tata Usaha;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di Lingkungan Bagian Tata Usaha;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkungan Bagian Tata Usaha;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Bagian Tata Usaha;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perencanaan dan evaluasi program;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait umum, kepegawaian dan humas;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan terkait administrasi rekam medik;
- h. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan bagian Tata Usaha;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan medik dan penunjang medik. Bidang Pelayanan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pelayanan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pelayanan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pelayanan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pelayanan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan medik;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penunjang medik;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pelayanan;
- a. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 4. Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan, mutu dan etika. Bidang Keperawatan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Keperawatan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Keperawatan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Keperawatan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Keperawatan;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait keperawatan dan asuhan keperawatan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait mutu dan etika;
- g. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian pelayanan keperawatan;
- h. melaksanakan koordinasi pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
- i. memfasilitasi pelayanan keperawatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Keperawatan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Keperawatan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 5. Bidang Keuangan

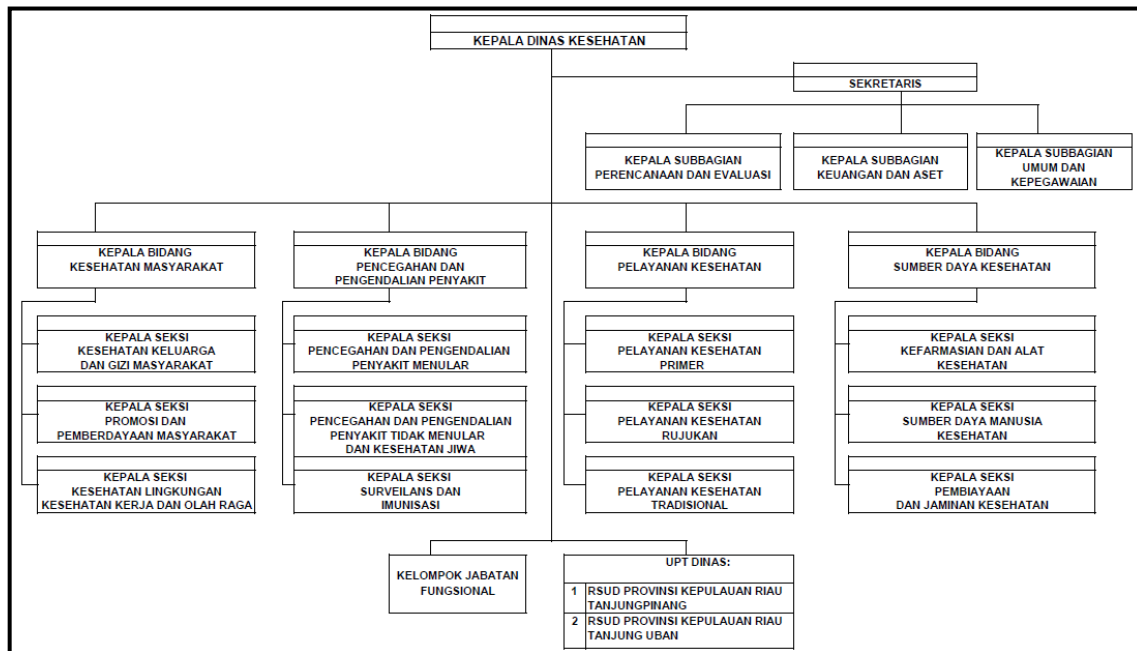
Bidang Keuangan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Anggaran dan Perbendaharaan keuangan dan verifikasi keuangan. Bidang Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Keuangan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Keuangan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Keuangan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Keuangan;

- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait anggaran dan perbendaharaan keuangan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait verifikasi keuangan;
- g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan pengujian dan penataan administrasi pengeluaran anggaran;
- i. melaksanakan penagihan tuntutan perbendaharaan;
- j. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- k. menyiapkan bahan konsep SPP sebagai dasar penerbitan SPM;
- l. menyelenggarakan administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Keuangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Keuangan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 2.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah seperti bagan berikut :



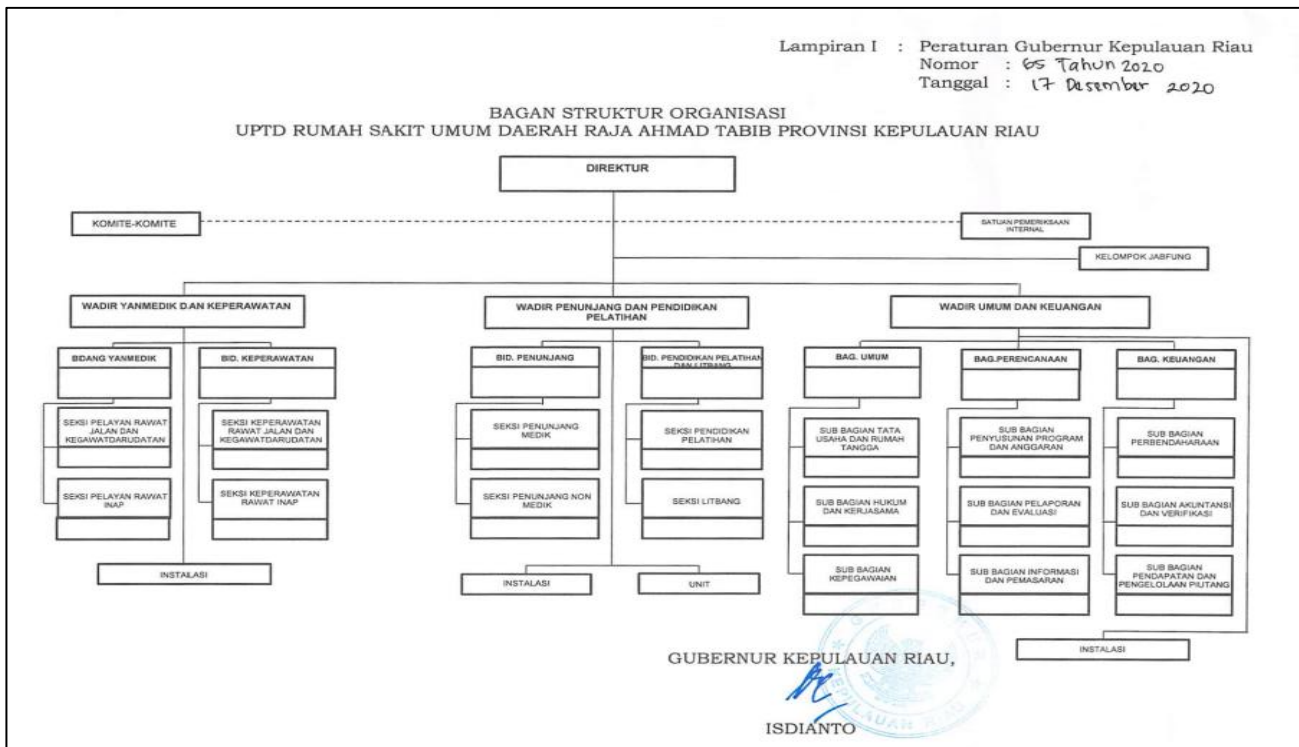
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2017

**Gambar 2.1.**  
**SOTK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Gambar 2.1., Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Sekretariat memiliki 3 Subbag, sedangkan tiap bidang memiliki 3 seksi. Jumlah jabatan eselon II terdiri atas 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 15 orang.

Terdapat dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang (disebut RSUD Raja Ahmad Tabib) dan RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban (disebut RSUD Engku Haji Daud). Detail rencana strategis 2 UPT tersebut, disusun dalam bentuk lampiran dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

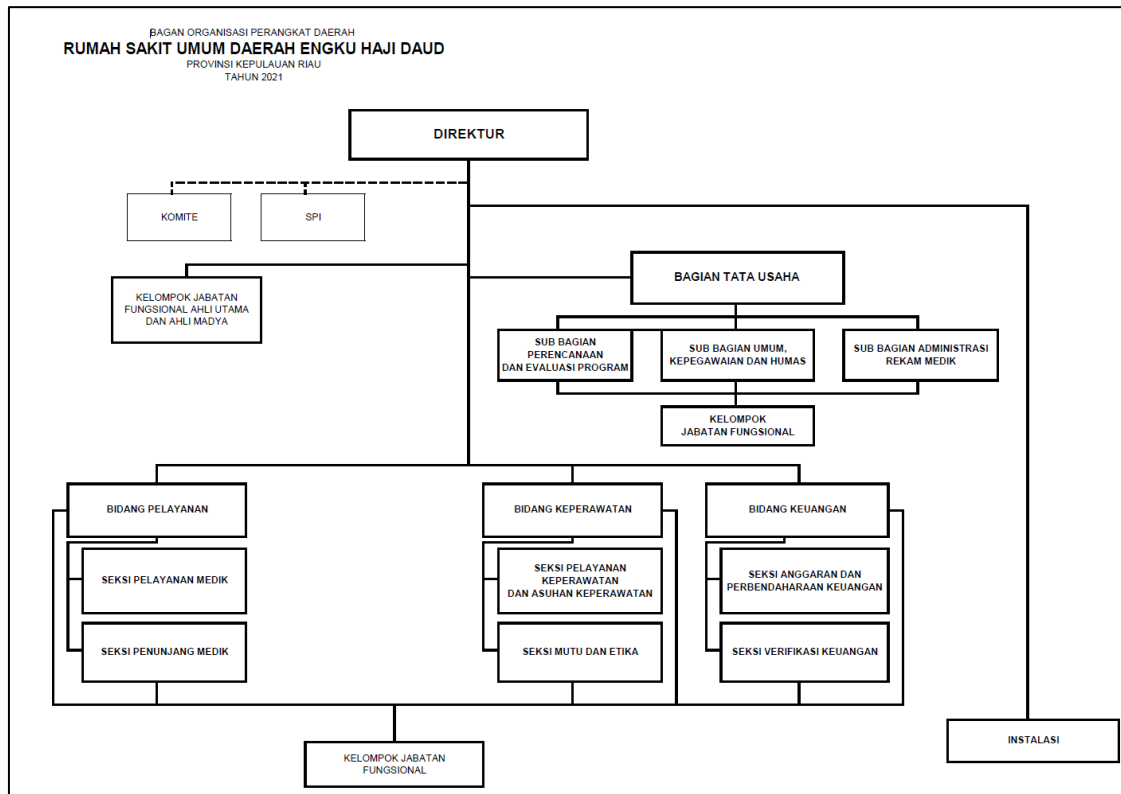




Sumber: Subbagian Kepegawaian, 2020

**Gambar 2.2.**  
**SOTK RSUD Raja Ahmad Tabib**

RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan RS dengan Tipe B Non Pendidikan, terdiri atas 1 (satu) jabatan Direktur dan 3 (tiga) Wakil Direktur (Wadir) yaitu Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan, Wadir Penunjang dan Pendidikan Pelatihan, Wadir Umum dan Keuangan. Jumlah Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang dengan jumlah seksi dibawahnya sebanyak 2 seksi per bidang. Terdapat 3 (tiga) bagian dengan jumlah subbag dibawahnya sebanyak 3 subbag per bagian.



**Gambar 2.3**  
**SOTK RSUD Engku Haji Daud**

RSUD Engku Haji Daud merupakan RSUD Provinsi dengan Tipe C, terdiri dari 1 (satu) Direktur, 1 (satu) Bagian dengan 3 (tiga) Subbag dibawahnya. Lalu memiliki 3 (tiga) Bidang dengan 2 (dua) seksi per tiap bidang.

## 2.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset. Dijabarkan secara rinci, yaitu :

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya manusia (SDM) sejumlah 180 orang yang terdiri atas SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 104 Orang dan SDM non PNS sejumlah 76 orang.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pejabat eselon II	1							
2	Pejabat eselon III	2	2						
3	Pejabat eselon IV	2	3	2	4				
4	Staf PNS	2	4	11	66	1	4	0	0
<b>Jumlah</b>		7	9	13	70	1	4	0	0
<b>Total PNS</b>		<b>104</b>							

Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa jumlah SDM PNS laki-laki sejumlah 21 orang (20,19%) dan PNS Perempuan sejumlah 83 orang (79,80%). Jumlah PNS golongan IV sebanyak 16 orang, golongan III sebanyak 83 orang dan golongan II sebanyak 5 orang. Berikut ini rincian SDM non PNS :

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah SDM Non PNS**

No	Penempatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Bidang Sekretariat	13	14	27
2	Bidang Yankes	3	3	6
3	Bidang P2PL	4	7	11
4	Bidang SDM	12	7	19
5	Bidang Promkes dan Kesga	4	9	13
<b>Jumlah Non PNS</b>		36	40	<b>76</b>

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat terlihat bahwa jumlah SDM non PNS perempuan lebih banyak berbanding laki-laki, dengan rincian laki-laki sejumlah 36 orang (47,36%) dan perempuan sejumlah 40 orang (52,63%). Bidang sekretariat memiliki jumlah SDM

Non PNS yang lebih banyak berbanding bidang lainnya (27 orang). Rincian SDM berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1.	Pasca Sarjana (S2)	10	17	27	15
2.	Sarjana (S1/DIV)	21	68	89	49,44
3.	Diploma III (D III)	5	29	34	18,89
4.	Diploma I (D I)	0	1	1	0,55
5.	SMA	17	9	26	14,44
6.	SMP	1	2	3	1,67
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>125</b>	<b>180</b>	<b>100</b>

Tabel 2.3. menunjukkan sebagian besar SDM (PNS dan Non PNS) memiliki tingkat pendidikan Sarjana/DIV dengan jumlah sebanyak 89 orang (49,44%), selanjutnya tingkat pendidikan DIII mendominasi yaitu sebanyak 34 orang (18,89%). SDM dengan tingkat pendidikan pascasarjana sejumlah 27 orang (15%).

Distribusi SDM di RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Haji Engku Daud sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau diuraikan melalui Tabel 2.4. berikut ini :

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah SDM UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

NO	Profesi	Jumlah SDM	
		RSUD Raja Ahmad Tabib	RSUD Haji Engku Daud
1	Dokter Spesialis	45	20
2	Dokter Umum	31	12
3	Dokter Gigi	1	2
4	Perawat dan Bidan	329	187
5	Penunjang Medis	109	80
6	Penunjang Non Medis	18	75
<b>Jumlah</b>		<b>533</b>	<b>376</b>

Berdasarkan Tabel 2.4., pada tahun 2021, jumlah SDM RSUD Raja Ahmad Tabib sebanyak 533 orang dengan jenis profesi terbanyak yaitu perawat dan bidan. Untuk RSUD Haji Engku Daud memiliki jumlah SDM sebanyak 376 orang dan jenis profesi terbanyak yaitu perawat dan bidan dengan jumlah 187 orang.

### **2.2.2. Sumber Daya Aset**

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini Daftar aset yang dikelola hingga tahun 2021:

**Tabel 2.5.**  
**Daftar Aset yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Alat-Alat Besar Darat	Unit	2
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit	52
3	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Unit	2
4	Alat Angkut Apung Bermotor	Unit	2
5	Alat Bengkel Bermesin	Unit	1
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	Unit	1
7	Alat Ukur	Unit	13
8	Alat Pengolahan	Unit	22
9	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Unit	18
10	Alat Kantor	Unit	274
11	Alat Rumah Tangga	Unit	822
12	Peralatan Komputer	Unit	361
13	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Unit	256
14	Alat Studio	Unit	53
15	Alat Komunikasi	Unit	27
16	Peralatan Pemancar	Unit	1
17	Alat Kedokteran	Unit	155
18	Alat Kesehatan	Unit	76
19	Unit-Unit Laboratorium	Unit	57
20	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Unit	5
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Unit	15
22	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Unit	26
23	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Unit	78
24	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Unit	27
25	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Unit	1
26	Persenjataan Non Senjata Api	Unit	6
27	Alat Keamanan dan Perlindungan	Unit	5

**Tabel 2.6**  
**Daftar Aset RSUD Raja Ahmad Tabib**

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	a. Alat-alat Besar	UNIT	2
	b. Alat-alat Angkutan	UNIT	28
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	UNIT	1.239
	d. Alat-alat Pertanian / Peternakan	UNIT	42
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	UNIT	13.018
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	UNIT	211
	g. Alat-alat Kedokteran	UNIT	4.076
	h. Alat-alat Laboratorium	UNIT	10.015
	i. Alat-alat Keamanan	UNIT	163
	a. Bangunan Gedung	UNIT	49
	a. Jalan dan Jembatan	UNIT	3
	b. Bangunan Air / Irigasi	UNIT	14
	c. Instalasi	UNIT	3
	d. Jaringan	UNIT	188
	a. Buku Perpustakaan	UNIT	718
	b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	UNIT	51
	c. Hewan Ternak dan Tumbuh-Tumbuhan	UNIT	131

**Tabel 2.7**  
**Daftar Aset RSUD Engku Haji Daud**

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Alat-alat angkutan	Unit	18
2	Alat-alat kantor dan rumah tangga	Unit	1087
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Unit	8
4	Alat-alat Kedokteran	Unit	439
5	Alat-alat Laboratorium	Unit	5
6	Alat Besar	Unit	3
7	Alat-alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	Unit	17
8	Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Unit	1
9	Bangunan Gedung	Unit	13
10	Instalasi	Unit	6

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
11	Buku Perpustakaan	Unit	30
12	Aset Tidak Berwujud	Unit	3
13	Alat Kantor	Unit	267
14	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	Unit	189
15	Peralatan Komputer	Unit	157
16	Alat Pemeliharaan Tanaman /Alat Penyimpan		54

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

### 2.3.1. Kinerja Umum

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, sumber daya manusia kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, farmasi dan perbekalan kesehatan, manajemen informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi kesehatan termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

### 2.3.2. Kinerja Khusus

Kondisi Kesehatan masyarakat yang prima merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan sekaligus sebagai target yang harus dicapai dan diwujudkan oleh pemerintah. Pencapaian target pembangunan kesehatan berkontribusi dalam pencapaian ukuran pembangunan manusia (*Human Development Index*) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dengan wilayah geografis yang sangat luas pada pulau-pulau yang terpisah oleh laut, pembangunan kesehatan di Kepulauan Riau mempunyai tantangan berat menyediakan



sarana, prasarana dan tenaga kesehatan untuk menjamin setiap penduduk agar mau dan mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau terutama dikarenakan hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan. Berdasarkan dua penyebab kematian tersebut, pengoptimalan program *Antenatal Care* (ANC) atau disebut juga Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan akan berdampak besar dalam mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan kematian. Sebaran kasus kematian ibu dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini:

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Kasus Kematian Ibu berdasarkan Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020**

No	Nama Kabupaten Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karimun	6	12	4	3	5
2	Bintan	4	2	4	5	5
3	Natuna	1	4	2	1	2
4	Lingga	5	1	6	2	3
5	Batam	29	30	25	23	18
6	Tanjungpinang	0	2	8	5	4
7	Kep. Anambas	4	3	2	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>38</b>

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau, 2016-2020

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup). AKB Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2017 - 2020 menunjukkan penurunan berdasarkan kematian yang dilaporkan (tidak melalui data survei). Pada tahun 2016 AKB sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 11,1 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. AKB yang relatif kecil disebabkan karena pelaporan rutin kematian bayi, hanya pada tingkat fasyankes pemerintah sehingga dimungkinkan banyak kasus yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk menghitung estimasi AKB sebesar 2 sampai 3 kali lipat dari AKB yang dilaporkan oleh pelayanan kesehatan. Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, Kelainan congenital, dan Icterus. Berdasarkan tabel 2.7. dapat diketahui bahwa jumlah kematian bayi tertinggi berada di Kota Batam, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Tabel 2.9.**

**Jumlah Kasus Kematian Bayi berdasarkan Kabupaten/Kota  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

<b>No</b>	<b>Nama Kabupaten Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Karimun	57	64	54	54	47
2	Bintan	26	27	25	29	14
3	Natuna	18	18	17	23	17
4	Lingga	25	20	23	25	19
5	Batam	138	162	145	110	106
6	Tanjungpinang	49	26	26	23	17
7	Kep. Anambas	13	12	9	8	9
Jumlah		326	329	299	272	229

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau, 2016-2020

Kinerja berkaitan dengan upaya kesehatan antara lain terlihat dari indikator Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita. Capaian kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Urusan Kesehatan</b>													
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	132	131	130	129	131	130	98	92	101	101	124	129
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	34	33	32	31	18	15	13	11,1	147	154	160	164
3	Persentase kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita	%	17,4	17,1	16,8	16,5	16,4	13	11,9	5,6	106	124	129	166
4	Cakupan kabupaten/kota sehat	%	43	57	57	70	57	71,4	100	100	132	125	175	143
5	Prevalensi HIV	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,05	100	100	100	190
6	<i>Case Notification Rate</i> (CNR) semua kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	155	160	165	170	181	177	316	164	117	110	192	97
7	Angka Keberhasilan Pengobatan TB ( <i>success rate</i> )	%	80	81	82	83	88	81	87,7	90,5	110	100	107	109
8	Insidens rate DBD per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	100	97	94	91	38,2	56	91	76,15	162	142	103	116

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	API ( <i>Annual Paracite Index</i> ) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,35	0,33	0,31	0,29	0,2	0,14	0,14	0,09	142	158	157	169
10	Persentase Usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90	91	92	93	94	91	96,9	89,6	104	100	105	96
11	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	28,7	28,5	28,30	28,10	27,3	27,4	28,20	26,28	105	104	100	107
12	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	42,8	42,8	57,14	57,14	71,4	100	100	100	167	237	175	175
13	Persentase puskesmas terakreditasi	%	12	25	38	50	19,48	79,3	96,5	96,51	162	317	254	193
14	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	65	70	72	78	71,4	82,6	86,1	89,65	109	118	120	115
15	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	56	58	60	63	50	56,32	77	49,43	89	97	128	78
16	Persentase RS kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	%	58	60	63	68	58	73,68	73,7	51,72	100	123	117	76

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	78	81	82	85	88,5	93,1	92	93,18	113	115	112	110
18	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel 2.11**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020**

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Urusan Kesehatan</b>													
1	Akreditasi Rumah Sakit versi KARS	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78	78	80	80	78	79	80,62	78,2	100	101	101	98
3	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	63	65	67	69	70,21	84	85,7	85,7	111	129	123	124

**Tabel 2.12**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020**

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Urusan Kesehatan</b>													
1	Akreditasi Rumah Sakit versi KARS	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	76	77	78	78	80	85,5	81,5	104	105	111	104
3	Persentase jumlah perawat terlatih layanan kesehatan jiwa	%	33	45	65	70	33	53	93	100	100	118	143	143



Berdasarkan tabel 2.10 diketahui bahwa persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita menurun cukup signifikan dari 16,4% di tahun 2016 menjadi 5,6% di tahun 2020. Berdasarkan Tabel 2.13, diketahui bahwa kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita tertinggi pada Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Tabel 2.13.**  
**Persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita per Kota/Kabupaten Tahun 2017-2020**

No	Nama Kabupaten Kota	2017	2018	2019	2020
1	Karimun	13,5	16,2	11,52	7,35
2	Bintan	9,9	16,2	11,41	7,11
3	Natuna	13,1	15,9	12,68	9,94
4	Lingga	21,5	23,9	13,83	10,57
5	Kota Batam	17,5	11,8	10,55	5,04
6	Kota Tanjungpinang	15,8	11,3	6,72	1,11
7	Kep.Anambas	14,7	14,8	10,86	11,26
Jumlah		16,4	13	11,35	5,6

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau, Diolah

Penurunan kasus *underweight* di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kinerja dari berbagai pihak. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan RS, bersama lintas sektor terkait telah menjalin komitmen untuk menanggulangi kasus permasalahan gizi yang ditemukan di masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam penurunan balita dengan status kekurangan gizi, yaitu dengan melakukan monitoring pelacakan dan konfirmasi masalah gizi di Kabupaten/Kota. Hasil temuan dari pelacakan gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau secara umum disebabkan pola asuh, penyakit penyerta dan tingkat perekonomian rendah. Dari hasil wawancara konseling riwayat Pemberian Makanan Bagi Anak (PMBA), balita dengan kekurangan gizi tidak diberikan ASI Eksklusif dan pemberian makanan yang tidak adekuat (jumlah yang dikonsumsi masih kurang dari Angka Kecukupan Gizi/AKG bagi anak).

Untuk menekan jumlah kasus balita dengan kekurangan gizi, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya - upaya sebagai berikut:

1. Penanganan kasus gizi buruk menggunakan prosedur tetap (SOP) tatalaksana asuhan gizi baik di puskesmas maupun di rumah sakit.

2. Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita masih sangat diperlukan terutama di daerah - daerah *hinterland* dan terpencil.
3. Pola asuh menjadi penyebab utama kejadian gizi buruk pada Balita. Pola Asuh berkaitan dengan cara pemberian makanan sehari-hari. Anak akan bertumbuh kembang dengan baik jika mendapatkan pola asuh yang baik yaitu:
  - IMD dan ASI Eksklusif selama 6 bulan
  - Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai bayi usia 6 bulan
  - Melanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih
  - Pemberian kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus
  - Menimbang berat badan secara rutin di Posyandu
  - Pemantauan tahap perkembangan balita melalui program Stimulasi, Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan kelas ibu balita di Puskesmas

Berdasarkan hasil evaluasi atas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 terdapat indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan dan Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang. Pencapaian kinerja indikator persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang disebabkan oleh sulitnya mencari sumberdaya dokter spesialis. Demikian juga untuk indikator Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan belum mencapai 100% karena sulitnya penempatan tenaga kesehatan di wilayah DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) serta tingkat tingkat mutasi tinggi di daerah. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah melakukan pengusulan penempatan tenaga kesehatan melalui program Kementerian Kesehatan RI yaitu Program Nusantara Sehat, Program Internsip Dokter Indonesia dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis.

Penghargaan yang telah diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2017 sampai dengan 2020 dalam bidang kesehatan yaitu Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik “Cegah Stunting Bersama Dokter Keluarga” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol

terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara. Ada 6 urusan wajib dalam SPM, salah satunya adalah kesehatan.

Untuk level provinsi, SPM bidang kesehatan ada dua, yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi. Pada tahun 2020, SPM bidang kesehatan tercapai 100%. Pada tabel 2.14 diuraikan capaian SPM Provinsi Kepulauan Riau bidang kesehatan tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
**Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020**

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Capaian = $(4):(3) \times 100\%$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	332.214	332.214	100%
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	16	16	100%

Capaian sasaran strategis RSUD Raja Ahmad Tabib yaitu terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi dapat

dilihat dari beberapa indikator diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat, Akreditasi KARS dan % Tenaga Kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi. Untuk realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 belum tercapai (78.2%) karena kondisi pandemi COVID-19. Sedangkan indikator persentase tenaga Kesehatan diarea khusus (IBS, ICU, IGD dan Perinatologi yang tersertifikasi) pada tahun 2017 - 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan.

Pencapaian akreditasi Rumah Sakit di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur pada setiap tahun. Bahwa berdasarkan surat dari komisi Akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/1330/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pemberitahuan Hasil Akreditasi maka RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 09 Desember Tahun 2022, yang kemudian dikukuhkan dengan Sertifikat Akreditasi Nomor: KARS-SERT/1330/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Akreditasi RSUD Engku Haji Daud sejak tahun 2017 telah mencapai paripurna hingga saat ini mampu dipertahankan. Untuk pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sejak tahun 2017 – 2020 mengalami peningkatan dari sebelumnya 78% di tahun 2017 menjadi 81,5% di tahun 2020. Persentase jumlah perawat terlatih layanan kesehatan jiwa juga mengalami peningkatan dari hanya 33% di tahun 2017 mampu dipenuhi menjadi 100% di tahun 2020.

### **2.3.3. Analisis pengelolaan pendanaan OPD**

Dari segi pendanaan, pada Tabel 2.15. terlihat perbandingan antara pagu anggaran yang tersedia dan realisasi anggaran bersumber APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020. Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017-2020 bersifat fluktuatif. Realisasi anggaran tertinggi yaitu 99% di tahun 2020, dan realisasi capaian terendah berada di tahun 2017 yaitu sebesar 90%. Beberapa permasalahan yang ditemui dalam peningkatan akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebagai berikut :

- Terdapat ketimpangan antara proyeksi anggaran di RPJMD dengan proyeksi anggaran tahun berjalan (pagu definitif) sehingga beberapa kali terjadi refocusing di pertengahan tahun anggaran.

- Program kegiatan yang bersifat essential di tahun 2020 sempat terhambat pelaksanaannya karena adanya Pandemi COVID-19.
- Terdapat program kegiatan tunda bayar di tahun 2017-2018
- Terdapat transfer pemerintah pusat atas anggaran BOK insentif tenaga kesehatan di akhir tahun 2020 yang berdampak pada keseimbangan neraca pendapatan daerah, dimana realisasi keuangan lebih tinggi berbanding pagu DPA.
- Fluktuasi anggaran sektor kesehatan

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini :

**Tabel 2.15**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020**

(Dalam Juta)

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.472	4.652	4.229	3.816	4.347	4.551	4.229	3.809	97,19%	97,81%	99,46%	99,80%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	774	387	569	1.084	763	387	558	1.084	98,52%	99,78%	98,17%	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	139	141	-	10	137	132	-	10	98,75%	93,88%	-	100%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	119	126	216	4	110	125	213	4	92,45%	99,33%	98,72%	100%
5	Program Kesehatan Masyarakat	4.476	4.603	5.215	10.159	3.789	3.528	4.741	9.304	84,66%	76,64%	90,92%	91,58%
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2.641	2.444	1.304	16.260	2.387	2.208	1.226	16.051	90,39%	90,35%	94,04%	98,71%
7	Program Pelayanan Kesehatan	19.521	10.941	10.078	18.114	14.605	8.961	9.902	17.969	74,82%	81,90%	98,26%	99,20%
8	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.613	1.620	1.331	615	1.122	1.402	1.091	577	69,56%	86,55%	81,97%	93,90%
9	Program Pengembangan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	3.294	11.071	10.700	12.995	3.226	10.674	9.865	14.056	97,93%	96,41%	92,20%	108,16%
10	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	12.169	1.302	1.295	433	11.551	1.271	1.281	424	94,92%	97,68%	98,88%	98,02%
11	Program Pengembangan Data/Informasi	446	241	193	57	393	239	184	57	88,05%	99,09%	94,91%	99,93%

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	510	-	-	51	499	-	-	51	97,95%	-	-	100%
13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan												
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan												
	JUMLAH	50.179	37.534	35.134	63.603	42.933	33.482	33.272	63.401	90%	93%	95%	99%

**Tabel 2.16**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020**

NO	Program	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.721	34.506	38.899	35.963	22.011	32.747	36.658	35.673	96.88%	94.90%	94.24%	99,19%
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tunda Bayar)	-	479.921	-	-	-	479.921	-	-	-	100%	-	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	316	268	615	91	287	239	510	90	91.03%	89.43%	83.00%	99,52%
4	Pelayanan Kesehatan	70.950	48.250	41.299	14.261	82.270	47.480	583.004	13.842	115.95%	98.40%	93.39%	95,41%
5	Pelayanan Kesehatan (Tunda Bayar)	-	9	-	-	-	9	-	-		100%	-	
6	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	949	140.500	2.000	132	919	1.183	1.752	117	96.78 %	84.18%	87.59%	93,54%
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-	58.727	59.349	-	-	67.276	58.300	-	-	114.55%	98.23%	100%
8	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	40.802	-	-	-	406.170	-	-	-	99.55 %	-	-	-
9	Pengembangan Data/Informasi	14.580	1.684	25.950	1.106	1.434	1.619	2.440	1.081	98.36%	96.18%	94.03%	97,84%



NO	Program	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	905	1.106	885	295	861	1.003	646	292	95.17 %	90.73%	-	99,59%
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	500	841	-	-	495	8.321		-	-	98.95%	-
12	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	235	330	15	-	2.337	320	158	-	99.34%	97.06%	98,67%
13	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-	-	-	32.776	-	-	-	32.661	-		-	99,65%
	JUMLAH	151.223	765.706	170.168	84.639	513.952	634.309	691.951	83.914	107.46	103.80	95.38	98.75

**Tabel 2.17**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020**

(Dalam Juta)

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	15.171	17.942	12.678	-	14.949	17.557	12.168	-	98,54	97,85 %	95,97 %
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	195	139	39,5	-	194	136	39,5	-	99,60	97,85 %	100 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	-	979	1.511	39,5	-	907	962	39,5	-	92,67	63,66 %	100 %
4	Program pengembangan data / informasi.	-	1.109	841	170	-	1.050	812	143,7	-	94,75	96,55 %	84,53 %
5	Program Pelayanan Kesehatan	-	7.602	4.071	5.093	-	7.271	3,883	4.969	-	95,65	95,40 %	97,57 %
6	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-	5.774	9.839	6.372	-	5.191	9.199	4.207	-	89,91	93,49 %	66,02 %
7	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	-	-	-	9.472	-	-	-	5.964	-	-	-	62,97 %
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.	-	13.500	16.132	18.500	-	13.381	15.925	20.383	-	99,12	98,72 %	110,18 %
	JUMLAH	-	68.331	81.480	81.829	59.430	65.570	48.474	47.913	-	95,74	91,80	89,65

Pengelolaan pendanaan keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib terdiri dari anggaran APBD dan BLUD. Pendapatan dan Belanja BLUD tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Pendapatan BLUD turun pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan baru dari BPJS tentang pelayanan rujukan berjenjang sehingga kunjungan rawat jalan pasien ke RSUD Raja Ahmad Tabib mengalami penurunan drastis. Pendapatan dan belanja BLUD tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase meningkat sebesar 53% dari tahun 2019. Pendapatan tahun 2020 ini meningkat karena:

1. Pembayaran klaim dari pelayanan pasien COVID-19
2. Pembayaran klaim BPJS tepat waktu
3. Pembayaran piutang tahun 2019 dibayarkan pada tahun 2020.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

### **2.4.1 Tantangan**

Beberapa faktor eksternal yang menjadi tantangan dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 19 Pulau Terdepan di Provinsi Kepri (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5), yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jarak Tempuh Antar Kabupaten/Kota dan jarak tempuh antar kecamatan yang cukup lama juga menjadi tantangan untuk penyediaan akses ke pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean menjadikan persaingan dengan negara lain semakin besar, menjadi tantangan dalam peningkatan standarisasi, mutu dan keahlian khususnya tenaga kerja bidang kesehatan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pulau yang dihuni hanya 394 pulau yang sudah berpenghuni dari 2.401 pulau. Jumlah penduduk semakin bertambah, menjadi tantangan dalam penyediaan mutu dan kualitas fasyankes sesuai standar agar dapat diakses serta dimanfaatkan oleh setiap penduduk. Dependency Ratio Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 43, yang berarti setiap 100 orang produktif menanggung 43 orang tidak produktif. Secara teoritis pada tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai memasuki era Bonus Demografi, karena setiap 1 orang

penduduk tidak produktif ditanggung oleh 2 orang (atau lebih) penduduk usia produktif.

Migrasi penduduk yang cukup tinggi terjadi diwilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam dengan penduduk hampir 50% dari jumlah keseluruhan penduduk Kepulauan Riau, terkenal disebut kota industri dan kota wisata menarik banyak kunjungan baik sementara ataupun menetap. Hal ini menjadi tantangan terutama dalam penanggulangan penyakit menular seperti HIV AIDS dan *New Emerging Diseases* (Flu burung, SARS dan lainnya). Pada triwulan I Tahun 2020 pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia, mengakibatkan seluruh sektor terdampak. Imbas dari pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan dilihat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2016 sebesar 5,84% menjadi 6,13% pada tahun 2020.

Perubahan iklim adalah perubahan sistem cuaca dunia yang disebabkan oleh manusia. Dampak langsung dari perubahan iklim antara lain, naiknya air laut, naiknya suhu, terganggunya ketersediaan air bersih, dan pergantian cuaca. Seluruh dampak ini biasanya akan diikuti dengan dampak sosial dan peningkatan masalah kesehatan. sebagai contoh yaitu adanya tren peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berfluktuatif dikarenakan perubahan musim yang berubah-ubah.

Beberapa faktor eksternal tantangan RSUD Raja Ahmad Tabib dalam mengoptimalkan pelayanan rujukan jantung dan kardiovaskuler adalah perlu adanya penyediaan tenaga Dokter Spesialis sebagai dokter Bedah Toraks Kardiovaskuler (BTKV), dokter anestesi dan perawat khusus pelayanan Jantung dan Kardiovaskuler. Adapun Standar kebutuhan ketenagaan untuk pelayanan jantung dan kardiovaskuler adalah Dokter BTKV, Dokter anastesi KV, Dokter Intensive, Perfusionist, Perawat Bedah, Perawat Anastesi dan perawat ICU. Saat ini Tenaga medis yang memenuhi hanya dokter spesialis Jantung yang sudah melakukan *fellowship*.

Untuk mencapai target Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSUD Raja Ahmad Tabib mulai melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dan Fakultas Kedokteran Universitas Batam tahun 2021. Tantangan RSUD Raja Ahmad Tabib dalam mengoptimalkan Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah belum adanya sertifikat akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dari KEMENKES sebagai syarat menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

Dari segi internal, terdapat tantangan pada letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang strategis, berbatasan langsung dengan Negara Singapura, Malaysia, Vietnam Dan Kamboja, RSUD Raja Ahmad Tabib bersaing ketat dengan Rumah Sakit yang berada dinegara yang berbatasan langsung dengan Tanjungpinang. Diharapkan RSUD Raja Ahmad Tabib dapat menjadi pusat rujukan utama Provinsi Kepulauan Riau dengan pelayanan bertaraf Internasional yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik seperti halnya Rumah Sakit di Luar Negeri.

Tantangan yang dihadapi oleh RSUD Engku Haji Daud adalah fluktuasi nilai rupiah turut mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan RS dan daya beli masyarakat, perdagangan bebas membuka peluang bagi investor asing untuk membuka layanan baru, masyarakat berasumsi bahwa layanan kesehatan di RS pemerintah tidak profesional dan gratis serta UU perlindungan konsumen yang dapat mendorong masyarakat.

#### **2.4.2 Peluang**

Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dalam pembangunan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan Provinsi Kepri dan pengembangan wilayah terluar/perbatasan semakin meningkat, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adanya komitmen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik bidang kesehatan berupa ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dari segi internal, terdapat peluang pada letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang strategis, berbatasan langsung dengan Negara Singapura, Malaysia, Vietnam Dan Kamboja berpeluang meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan. Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) dari tahun ke tahun mencerminkan adanya peningkatan kualitas derajat kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

Beberapa peluang Eksternal Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yaitu adanya upaya dari pemerintah pusat (KEMENKES) untuk

menjadikan RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai pelayanan rujukan Jantung dan Kardiovaskuler di Provinsi Kepulauan Riau. KEMENKES juga berkoordinasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI) untuk memfasilitasi penguatan sumber daya manusia (SDM) dibidang spesialis Jantung dan Kardiovaskuler. Layanan *Cathlab* di RSUD Raja Ahmad Tabib sudah diresmikan oleh Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Diharapkan kedepan layanan jantung dan kardiovaskuler bisa menjadi layanan unggulan di Provinsi Kepulauan Riau.

RSUD Raja Ahmad Tabib sudah memenuhi kriteria sebagai rumah sakit Pendidikan sesuai peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014.

Peluang yang dimiliki oleh RSUD Engku Haji Daud adalah di daerah Bintan terdapat banyak kawasan industri dan pariwisata yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif, adanya subsidi dari pemerintah, adanya kebijakan BPJS yang akan menjamin setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, regulasi terkait BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan mendukung masyarakat termasuk rumah sakit.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

Permasalahan yang diidentifikasi pada pembangunan kesehatan berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:

- a) Pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga perlu terus dilakukan upaya penanganan yang serius dan terukur.
- b) Belum optimalnya penyebarannya tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota
- c) Beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan
- d) Risiko kematian ibu masih didominasi oleh kematian pada ibu nifas
- e) Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- f) Belum optimalnya Universal Child Immunization (UCI)
- g) Belum optimalnya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
- h) Belum optimalnya Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS
- i) pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan standar
- j) Kondisi pelayanan rawat inap RSUD Raja Ahmad Tabib saat ini belum ada gedung isolasi rawat inap untuk penyakit menular
- k) Alat Kesehatan khusus pelayanan jantung dan kardiovaskuler yang belum memenuhi standar
- l) Ruang khusus untuk pelayanan jantung dan kardiovaskuler belum memenuhi standar
- m) Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa kedokteran
- n) Gudang penyimpanan untuk logistik obat – obatan dan bahan habis pakai
- o) Komite medis dan komite keperawatan belum berfungsi secara optimal
- p) Dukungan anggaran dari pemerintah daerah kurang memadai
- q) Belum didukung oleh sistem informasi yang terkomputerisasi
- r) Sarana dan prasarana pendukung layanan masih kurang
- s) Alat-alat kesehatan masih kurang di beberapa unit kerja pelayanan

- t) Jumlah SDM masih kurang, kebanyakan belum berpengalaman dan ada yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya
- u) Disiplin dan komitmen masih rendah
- v) Belum ada program pengembangan dan pelatihan yang sistematis
- w) Belum adanya sistem *reward* dan *punishment*.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 – 2026 adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**. Untuk mencapai visi tersebut maka dikembangkan 5 misi yang saling mendukung, dengan rincian :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Untuk pembangunan kesehatan mengacu pada Misi ke-3 yaitu **“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa”**. Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada penguatan jaring pengaman sosial dan kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan pemulihan dampak Pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlu diberikan stimulus dan pengelolaan kesehatan guna meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Telaahan faktor pendorong dan penghambat atas program prioritas Gubernur Kepulauan Riau melalui Tabel 3.1 berikut ini :



**Tabel 3.1.**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat**  
**Program Prioritas Gubernur Kepulauan Riau Periode 2021-2026**

<b>VISI:</b>  <b>"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"</b>	
<b>MISI:</b>  <b>"Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa".</b>	
<b>Faktor</b>	
<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan COVID-19, dengan faktor penghambat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kasus COVID-19 yang tidak dilaporkan melalui sistem</li> <li>- Terdapat data ganda pada Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li> <li>- Stigma negatif pasien COVID-19</li> <li>- Terhambatnya sektor ekonomi akibat Pandemi COVID-19</li> <li>- Prosedural pelayanan bantuan sosial belum seluruhnya digital</li> </ul> </li> <li>2. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang responsif dan komprehensif, dengan faktor penghambat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografis berbentuk kepulauan memerlukan pendekatan sistem kesehatan khusus yang berbeda dengan model daratan</li> <li>- Beberapa Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau kurang diminati untuk menjadi tempat penempatan dr. Spesialis</li> <li>- Belum tersedianya RS Jiwa</li> <li>- Belum meratanya pembangunan kesehatan khususnya di Natuna, Anambas dan Lingga</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan COVID-19, dengan faktor pendorong : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penegakan protokol kesehatan</li> <li>- Telah tersedianya lahan untuk pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah</li> <li>- Kerjasama Lintas Sektor yang baik dalam penanggulangan COVID-19</li> <li>- Cakupan Vaksinasi COVID-19 yang tinggi berbanding provinsi lain</li> <li>- Terdapat penyediaan tempat karantina terpadu COVID-19</li> </ul> </li> <li>2. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang responsif dan komprehensif, dengan faktor pendorong : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pemerintah daerah untuk penyediaan 10% anggaran bagi sektor kesehatan</li> <li>- Adanya dukungan penganggaran dari Pemerintah Pusat untuk kesehatan melalui DAK</li> <li>- Kecukupan gizi didukung atas kemudahan mengakses makanan tinggi protein (potensi sumber daya laut)</li> <li>- Berbatasan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia sehingga teknologi informasi layanan digital cenderung berkembang lebih pesat</li> <li>- Terdapat 2 RS Rujukan Regional yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Embung Fatimah</li> </ul> </li> </ol>

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024**

Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” dan ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 misi pembangunan yaitu:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Terdapat lima tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024, yaitu meningkatkannya kesehatan ibu, anak; Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan; Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat; Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan; Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar; Terjaminnya pembiayaan kesehatan; Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih; Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Strategi pembangunan kesehatan 2020-2024 meliputi:

- Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
- Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- Terjaminnya pembiayaan kesehatan
- Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Faktor pendorong dan penghambat yang kemungkinan akan dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam 5 tahun kedepan dirincikan pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Sasaran Strategis Kementerian**  
**Kesehatan Berdasarkan Rencana Strategis Kemenkes RI**  
**Tahun 2020-2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
- Terjaminnya pembiayaan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya data penduduk yang valid (NIK Invalid).</li> <li>- Keterbatasan anggaran, dalam arti untuk meningkatkan capaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) di Provinsi Kepri Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran premi penduduk yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang belum tercover jaminan kesehatan.</li> <li>- Proporsi pembiayaan kuratif lebih besar dari pembiayaan preventif dan promosi kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan deteksi dini penyakit dan menjaga kesehatan</li> <li>- Adanya bantuan pembayaran Premi JKN/KIS bersumber Pajak Rokok</li> <li>- Terintegrasinya sistem rujukan di Provinsi Kepulauan Riau</li> </ul>
- Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya inkonsistensi penetapan anggaran</li> <li>- Adanya moratorium kebijakan pusat terkait pengangkatan SDM Kesehatan serta belum adanya payung hukum untuk pengangkatan 9 jenis tenaga strategis kesehatan di puskesmas</li> <li>- Belum terdistribusi pemerataan SDM kesehatan antar kabupaten/kota</li> <li>- Belum terpenuhinya sarana penunjang di fasyankes dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Pusat telah menyediakan bantuan keuangan dalam bentuk DAK Fisik dan Non Fisik</li> <li>- Regulasi dari Pemerintah Pusat dan daerah yang jelas terhadap penguatan pelayanan kesehatan primer</li> <li>- Bidang Kesehatan menjadi Bidang Prioritas Pemerintah Gubernur Kepulauan Riau</li> <li>- Adanya kebijakan alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar 10%</li> <li>- Komitmen Pemerintah Daerah untuk memenuhi sarana dan prasana kesehatan</li> </ul>
- Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reorientasi pelayanan kesehatan ke arah promotif dan preventif belum dapat dipahami sepenuhnya oleh stake holder terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Era digital memudahkan penyebaran media informasi ke masyarakat</li> <li>- Koordinasi yang telah terjalin baik antara lintas program dan lintas sektor.</li> </ul>

Sasaran Strategis	Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya dana untuk menjangkau masyarakat di lini terbawah</li> <li>- Kurangnya kapasitas tenaga promkes untuk menyusun media informasi yang menarik dengan menggunakan teknologi terbaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah terdapat beberapa organisasi masyarakat dan organisasi profesi yang peduli dengan kesehatan.</li> <li>- Mulai meningkatnya konten creator di wilayah Provinsi Kepri</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Isu terkait kesehatan dalam rencana tata ruang wilayah adalah sistem pengelolaan air limbah. sistem pengelolaan air limbah erat hubungannya dengan sanitasi atau kesehatan lingkungan, sehingga pengelolaan air limbah ini harus direncanakan dengan sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan.

Sistem pembuangan air limbah berupa air limbah domestik (rumah tangga), yang pengelolaan air limbah domestik umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem sanitasi setempat (*on site sanitation*) berupa jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik atau cubluk. Sedangkan penggunaan sistem sanitasi terpusat (*off site sanitation*) pelaksanaannya memerlukan biaya yang cukup besar juga dalam pemeliharaannya, sehingga penggunaan sistem sanitasi terpusat yang ada saat ini diperkirakan hanya dapat diterapkan untuk wilayah-wilayah komersial dan industri.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, bentuk dari Program Pelayanan Kesehatan yang berdampak terhadap isu KLHS adalah penyediaan Puskesmas/RSUD yang terakreditasi di setiap Kabupaten/Kota. Implikasi dari akreditasi tersebut adalah terpenuhinya persyaratan pengolahan fasilitas medis dengan limbah B3. Mitigasi program dalam mengurangi dampak limbah tersebut adalah dengan melengkapi fasilitas pengelolaan limbah

domestik dan B3 seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, SDG's) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga perlu terus dilakukan upaya penanganan yang serius dan terukur.

Pandemi Covid-19 diperkirakan dapat teratasi dengan baik pada tahun 2022. Kondisi ini menjadi angin segar bagi tumbuh kembangnya kegiatan masyarakat dalam kondisi yang normal. Di sisi lain, belum ada kepastian pada tahun tersebut semuanya akan dapat teratasi dengan baik. Sehingga perlu terus dilakukan penanganan yang serius dan terukur terhadap Pandemi Covid-19. Penyebab kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga masih terus meningkatkan jumlah positif Covid-19. Selain itu, belum terbentuknya herd immunity atas penularan COVID-19 di masyarakat. Merujuk pada rekomendasi World Health Organization (WHO) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) dapat tercapai melalui pelaksanaan vaksinasi dengan pemenuhan sasaran minimal 70% dari keseluruhan penduduk.

2. Belum optimalnya penyebarannya tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota

Kebijakan pembangunan kesehatan secara nasional, diantaranya diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Secara bertahap pemenuhan tenaga kesehatan baik medis maupun paramedis telah dilakukan terutama pada pemenuhan tenaga kesehatan di wilayah Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Secara rasio, capaian Provinsi Kepulauan Riau untuk indikator rasio dokter telah memenuhi target yaitu 76/100.000 penduduk di tahun 2020 (target

Indonesia sehat: 40/100.000 penduduk). Hal yang sama juga berlaku untuk rasio perawat dan bidan yang telah memenuhi target. Namun bila dilihat dari distribusi penyebaran tenaga kesehatan, hampir 50% masih terkonsentrasi di Kota Batam. Hal ini disebabkan oleh distribusi penduduk dan perbedaan tingkat pembangunan wilayah antar kabupaten/kota.

Pemenuhan dokter spesialis dan tenaga strategis menjadi isu penting dalam pemenuhan SDM di wilayah Kepulauan Riau. Pada tahun 2021, dokter spesialis yang ditempatkan di Kabupaten Lingga dan Anambas bersifat residen. Pemerintah daerah berupaya menyediakan dukungan insentif yang cukup memadai namun untuk beberapa kabupaten/kota tertentu peminatan masih rendah. Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (tenaga kesling, kefarmasian, gizi, kesmas, analis kesehatan) di tahun 2020 baru mencapai 49,43% dari target yang seharusnya 63%.

### 3. Beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan

Sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 rumah sakit yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Engku Haji Daud. RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) merupakan rumah sakit rujukan provinsi, yang akan ditingkatkan menjadi rumah sakit Pendidikan dan akan dilakukan pengembangan jejaring layanan jantung di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memenuhi kriteria tersebut, dibutuhkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang memiliki sertifikasi Catheterization Laboratory (Cath Lab). Untuk saat ini, RSUD RAT belum memiliki SDM tersebut. Sehingga dibutuhkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan sertifikasi Catheterization Laboratory (Cath Lab) dengan status ASN tetap.

Sedangkan RSUD Engku Haji Daud dengan rencana pengembangan sebagai RS jiwa. Saat ini RSUD Engku Haji Daud membutuhkan lahan seluas 7,5 ha untuk pengembangan layanan jiwa tersebut. Jumlah SDM khususnya dokter spesialis jiwa berjumlah 2 orang dengan status kepegawaiannya pegawai kontrak. Sehingga dibutuhkan dokter spesialis jiwa dengan status ASN tetap.



#### 4. Risiko kematian ibu masih didominasi oleh kematian pada ibu nifas

Kasus kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh kematian pada ibu nifas yaitu sebesar 49% pada tahun 2020. Sementara itu cakupan pelayanan nifas baru mencapai angka 90,74% pada tahun 2020. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya persalinan yang dilakukan di lokasi non fasilitas kesehatan (faskes). Hal ini dapat dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai angka 91,94% pada tahun 2020.

Kematian ibu nifas bisa terjadi dikarenakan deteksi risiko tinggi pada kehamilan dan pemeriksaan kesehatan ibu secara menyeluruh belum dilaksanakan secara optimal sehingga kemungkinan keterlambatan penanganan menjadi lebih besar, adanya persalinan yang tidak terpantau oleh bidan desa/ puskesmas karena dilakukan di RS dan lemahnya kinerja bidan desa sehingga bidan desa tidak mengetahui informasi dan belum sempat melaksanakan pemantauan melalui kunjungan rumah pada saat komplikasi ibu nifas terjadi. Cakupan pelayanan nifas masih belum optimal dikarenakan kinerja bidan desa yang masih lemah dalam memantau wilayahnya sehingga terkadang tidak mengetahui jika ada ibu nifas yang sudah melahirkan di RS yang perlu dipantau kondisinya melalui kunjungan rumah, pencatatan dan pelaporan masih belum optimal khususnya di daerah perkotaan yang memiliki banyak RS dan klinik, adanya kekhawatiran ibu nifas dan keluarga untuk melakukan kunjungan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

#### 5. Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Berbagai penyakit utama baik yang menular maupun tidak menular masih perlu dioptimalkan dalam penanganannya. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA pada tahun 2020 menurun menjadi 48,87% dari yang awalnya sebesar 68,64% pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan selama pandemi Covid-19 pihak kantor pos yang mengantarkan sampel ke laboratorium TCM tidak mau mengantarkan sampel karena adanya ketakutan tertular Covid-19, masyarakat yang ada keluhan



batuk atau terduga TBC selama pandemi Covid-19 tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut terindikasi dan tertular Covid-19, petugas puskesmas dan kader TB tidak melakukan kegiatan investigasi kontak karena takut tertular Covid-19, serta pengelola program tidak melakukan kegiatan penyisiran kasus TB di RS selama masa pandemi Covid-19.

Di sisi lain penemuan pneumonia mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 67,12% pada tahun 2020 dari awalnya sebesar 36,3% pada tahun 2019. Hal ini karena selama pandemi Covid 19 para petugas di layanan lebih difokuskan pada penanganan kasus Covid 19 dan dengan keluhan serta gejala yang sama sehingga semua pasien yang memiliki gejala pneumonia segera dilakukan tatalaksana COVID 19. Walaupun demikian, data untuk kasus Covid 19 dan data Pneumonia sangat jauh berbeda. Hal ini dikarenakan untuk penemuan kasus dengan gejala pneumonia sebelum ditegakkan diagnosa COVID 19, tidak dimasukkan ke dalam data Pneumonia. Penanganan terhadap kasus diare juga masih rendah yaitu hanya sebesar 42,4% pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan selama pandemi Covid-19 masyarakat yang ada keluhan infeksi saluran pencernaan atau diare selama pandemi Covid-19 tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas Kesehatan karena takut terindikasi dan tertular Covid-19, tidak semua petugas puskesmas sudah terlatih dalam tatalaksana penanganan diare; serta pengelola program tidak melakukan kegiatan investigasi kasus diare di masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

Penanganan terhadap penderita ODHA di Provinsi Kepulauan Riau juga belum maksimal, terbukti dari penemuan kasus HIV AIDS baru yang menurun drastis. Pada tahun 2019 penemuan Kasus HIV baru mencapai angka 883, di Tahun 2020 penemuan kasus baru hanya mencapai angka 563. Hal ini dikarenakan masyarakat enggan mengunjungi fasilitas kesehatan akibat pandemi yang terjadi.

#### 6. Belum optimalnya Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2020 turun menjadi 82,10% dari sebelumnya ditahun 2019 mencapai 85,37%. Hal disebabkan karena selama kondisi pandemi Covid-19 sebagian besar posyandu (luar gedung) tidak berjalan. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan oleh beban kerja yang tinggi di Puskesmas selama pandemi Covid 19.

7. Belum optimalnya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Capaian ODGJ berat yang mendapatkan layanan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 81,76% melebihi target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar 45%, akan tetapi masih ada kendala dan hambatan dalam pelayanan pada ODGJ, terutama pada ketersediaan obat-obatan khusus gangguan jiwa di puskesmas. Hal ini dikarenakan obat dimaksud belum masuk ke dalam program obat dari Kemenkes, sehingga penyediaannya hanya berupa buffer stock yang disediakan oleh Direktorat Obat Publik Kemenkes. Selain itu tidak tersedianya anggaran pada APBD di daerah untuk pengadaan obat-obat tersebut, hanya mengharapkan bantuan dari Obat Publik Kemenkes. Belum adanya RS Jiwa juga menyebabkan pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ jadi terhambat. Pasien ODGJ harus dirujuk ke RS Jiwa Pekanbaru yang membutuhkan tambahan biaya baik bagi pasien ODGJ maupun bagi keluarga yang mendampingi.

8. Belum optimalnya Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS

Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih perlu ditingkatkan dimana pada tahun 2020 masih sebesar 89,65%. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya data yang valid terkait penerimaan JKN karena belum tersedianya data penduduk yang valid (NIK invalid).

9. Pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan standar.

Limbah medis yang dihasilkan perlu dilakukan pengelolaan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ke beberapa fasilitas layanan Kesehatan (fasyankes) yang ada di tujuh Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan standar yang ada dalam aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pengelolaan limbah medis yang ada di fasyankes, waktu penyimpanan limbah melebihi aturan yang berlaku, masih ada limbah yang disimpan

dalam waktu yang lama di fasyankes, belum tersedia sarana/prasarana serta SDM yang menunjang pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai peraturan yang berlaku, belum semua puskesmas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin, belum semua puskesmas yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Incenerator yang dimiliki Rumah Sakit belum memiliki izin operasional, tingginya biaya pengolahan limbah dengan pihak ketiga, belum tersedianya kendaraan pengangkut khusus untuk limbah di wilayah kepulauan, serta belum ada pihak ketiga yang berizin yang mau mengangkut limbah yang ada di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah mewujudkan Kepulauan Riau Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Untuk mencapai tujuan umum tersebut berpedoman pada Misi Gubernur Kepulauan Riau.

**MISI ke- 3 (tiga) :** Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa

Untuk mencapai misi ini, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Tujuan : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

- Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dari 128/100.000 KH menjadi 121/100.000 KH;
- Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH dari 15/1.000 KH menjadi 10/1.000 KH;
- Menurunnya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Persentase kekurangan gizi dari 16,3% menjadi 12,8 %;
- Meningkatnya Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*) dari 90% menjadi 93%;
- Meningkatnya Capaian ODHA yang mendapatkan ARV dari 60% menjadi 80%;
- Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas  $\geq 80\%$  Puskesmas dari 57% menjadi 71%.
- Meningkatnya Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dari 92,90% menjadi 95,50%;
- Meningkatnya Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan

Nasional/KIS dari 87,88% menjadi 93%;

- Meningkatkan Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dari 57,14% menjadi 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatnya Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dari 50% menjadi 60%.
- Meningkatnya Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib dari 65% menjadi 85%
- Meningkatnya Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud dari 30% menjadi 60%

Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatkan Persentase Puskesmas terakreditasi dari 95,50% menjadi 98%;
- Meningkatkan Persentase Rumah Sakit terakreditasi dari 80% menjadi 100%;
- Meningkatkan Status akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib dari Paripurna menjadi Internasional;
- Mempertahankan Status akreditasi Paripurna RSUD Provinsi Engku Haji Daud;

Sasaran 4 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatkan Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor menjadi 100%

Target kinerja sasaran indikator yang disusun berdasarkan tahun kinerja (2021 - 2026) dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, secara rinci dijabarkan melalui Tabel 4.1 :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Angka Harapan Hidup (AHH)			70,13	70,27	70,41	70,56	70,70	70,85
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			16,3%	15,8%	15,3%	14%	13,3%	12,8%
			1. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	128 per 100.000 KH	125 per 100.000 KH	124 per 100.000 KH	123 per 100.000 KH	122 per 100.000 KH	121 per 100.000 KH
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	15 per 1.000 KH	14 per 1.000 KH	13 per 1.000 KH	12 per 1.000 KH	11 per 1.000 KH	10 per 1.000 KH
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	16,3%	15,8%	15,3%	14%	13,3%	12,8%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>Success Rate</i> )	90%	90%	92%	92%	93%	93%
				Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	60%	64%	68%	72%	76%	80%
				Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas $\geq$ 80% Puskesmas	57%	57%	71%	71%	71%	71%
				Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92,90%	93,60%	94,10%	94,60%	95,00%	95,50%
				Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	87,88%	89%	90%	91%	92%	93%
				Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan	57,14%	71,43%	71,43%	86%	86%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)						
			2. Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	50%	52%	54%	56%	58%	60%
				Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	60%	65%	70%	75%	80%	85%
				Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	25%	30%	35%	40%	50%	60%
			3. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas terakreditasi	95,50%	96%	97%	97%	97,50%	98%



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi	80%	85%	90%	95%	100%	100%
				Status akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Internasional	Internasional
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
			4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel 5.1. berikut ini :

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI (Gubernur Kepulauan Riau) :</b> "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"			
<b>MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke - 3 :</b> Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya kesehatan keluarga dan lingkungan sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</li> <li>• Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda</li> <li>• Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat</li> <li>• Hidup Sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (<i>Continuum Of Care</i>)</li> <li>• Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.</li> </ul>
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan Pengendalian Penyakit
	Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pelaksanaan JKN</li> <li>• Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan</li> <li>• Meningkatkan Akses, Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</li> </ul>

		Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan	
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer ( <i>Primary Health Care</i> ) Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2021-2026 maka program, kegiatan, rincian indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.

Secara garis besar kegiatan terkait program sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan; Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

#### 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM dengan Sub Kegiatan; Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan

Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan Sub Kegiatan; Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan; Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dengan Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK.

#### 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan; Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan; Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berkesinambungan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Pada Misi ke-3 Gubernur Kepulauan Riau terdapat satu tujuan yang berkaitan dengan bidang kesehatan yaitu tujuan 3.1. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter . Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat. Kesesuaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, selanjutnya diuraikan sebagai berikut melalui Tabel 7.1. :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Angka Harapan Hidup	69,96	70,13	70,27	70,41	70,56	70,70	70,85	121
2.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16,82	16,3	15,8	15,3	14	13,3	12,8	12,8

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur terpilih periode 2021-2026. Renstra Dinas kesehatan provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan jangka menengah, yang memiliki kedudukan yang strategis sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

#### 8.1 Pedoman Transisi

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026 begitu juga dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2021-2026 berakhir, maka RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD (Bidang Kesehatan) tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2020-2024.

#### 8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan kesehatan hingga tahun 2026. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan selama periode 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.



2. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan usaha-usaha untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berkarakter selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
3. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selama periode lima tahun yaitu tahun 2021-2026.
4. Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Satker Bidang Kesehatan se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Renstra OPD harus memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten/Kota dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.



**LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA  
DINAS KESEHATAN DAN RSUD**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN RSUD PROVINSI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	270,391,836,355	100	167,199,136,210	100	200,509,621,126	100	215,183,108,509	100	230,931,252,949	100	328,856,678,971	100	246,783,412,090	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
Indikator Tujuan :		1.2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	1	02	01	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		100%	502,427,479	100%	1,491,869,953	100%	2,461,250,760	100%	2,931,450,824	100%	3,335,335,758	100%	3,637,895,692	100%	3,635,631,897	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
Angka Harapan Hidup		1. 3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			81,676,500		367,105,100		176,833,840		251,967,216		352,110,298		597,263,795		595,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi			
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		1.4 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)					Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100%	22,000,000	100%	272,000,000	100%	75,000,000	100%	150,000,000	100%	250,000,000	100%	495,000,000	100%	495,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
		1.5 Capaian ODAHA yang mendapatkan ARV					Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	1	1,833,840	1	1,967,216	0	2,110,298	0	2,263,795	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib			
		1.6 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	59,676,500	6	95,105,100	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
		1.7 Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			-		-		250,000,000		267,800,000		190,170,310		100,000,000		100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
		1.8 Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS					Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	250,000,000	100%	267,800,000	100%	190,170,310	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
		1.9 Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		275,000,000		275,000,000		275,000,000		275,000,000		275,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
	2. Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	2.1 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar					Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
		2.2 Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			358,512,879		575,000,000		813,500,000		845,700,000		891,000,000		894,500,000		894,500,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
		2.3 Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud					Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	%	100%	358,512,879	100%	575,000,000	100%	813,500,000	100%	845,700,000	100%	891,000,000	100%	894,500,000	100%	894,500,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
	3. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	3.1 Persentase Puskesmas terakreditasi					Persentase Satker Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengusulkan kegiatan DAK	%	80%	-	82%	-	84%		85%		86%		87%		87%		Dinas Kesehatan	Provinsi		
		3.2 Persentase Rumah Sakit terakreditasi				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD			-		-		235,000,000		350,000,000		500,000,000		525,000,000		525,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
		3.3 Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib					Persentase Penyusunan Dokumen DPA-Perubahan SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	235,000,000	100%	350,000,000	100%	500,000,000	100%	525,000,000	100%	525,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
		3.4 Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			49,938,100		25,000,000		285,916,920		400,983,608		551,055,149		576,131,897		576,131,897	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
									Tahun Dasar		Target														
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	4.1 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor					Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100%	-		-	100%	235,000,000	100%	350,000,000	100%	500,000,000	100%	525,000,000	100%	525,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80%		82%		84%		85%		86%		87%		87%		Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	40,000,000	0	0	1 Laporan	916,920	1 Laporan	983,608	1 laporan	1,055,149	1 laporan	1,131,897	1 laporan	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib		
							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	9,938,100	1	25,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,300,000		524,764,853		425,000,000		540,000,000		576,000,000		670,000,000		670,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	12,300,000	100%	524,764,853	100%	425,000,000	100%	540,000,000	100%	576,000,000	100%	670,000,000	100%	670,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda/Rakorpin yang disusun	Dokumen	0	-	1	-	1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi	
			1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	114,880,735,843	100%	88,318,830,538	100%	98,001,964,639	100%	104,354,289,791	100%	112,165,296,352	100%	119,758,294,990	100%	118,858,294,990	Dinas Kesehatan	Provinsi
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			112,221,955,843		84,120,174,538		93,001,650,977		99,115,791,671		106,736,661,740		114,139,467,737	100%	114,139,467,737	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
							Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan	%	100%	15,496,547,687	100%	22,155,287,368	100%	20,559,000,000	100%	21,586,950,000	100%	22,666,297,500	100%	23,799,612,375	100%	23,799,612,375	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12 bulan	60,403,060,562	12 bulan	31,978,552,065	12 bulan	36,084,232,345	12 Bulan	38,708,653,693	12 Bulan	41,524,071,875	12 bulan	44,544,396,126	12 bulan	44,544,396,126	RSUD Raja Ahmad Tabib		
							Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Setiap Tahunnya	%	100%	36,322,347,594	100%	29,986,335,105	100%	36,358,418,632	100%	38,820,187,978	100%	42,546,292,365	100%	45,795,459,236	100%	45,795,459,236	RSUD EHD	Provinsi	
							Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN			2,463,334,000		4,141,156,000		2,614,812,142		2,802,596,473		2,992,303,717		3,182,035,869	100%	2,282,035,869	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
							Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	100%	801,840,000	100%	2,784,920,000	100%	1,045,187,000	100%	1,094,632,000	100%	1,111,026,400	100%	1,122,110,000	100%	1,122,110,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12 bulan	1,169,098,000	1 tahun	825,440,000	1 Tahun	939,625,142	1 tahun	1,007,964,473	1 tahun	1,081,277,317	1 tahun	1,159,925,869	1 tahun	1,159,925,869	RSUD Raja Ahmad Tabib		
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	100%	492,396,000	100%	530,796,000	100%	630,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	100%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			99,947,000		-		455,916,920		455,983,608		456,055,149		456,131,897	100%	456,131,897	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
							Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun Dasar		2022				2023		2024		2025		2026		2026			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
					Jumlah laporan akuntansi yang dikordinasikan dengan pihak pihak terkait	Laporan	1 Laporan	99,947,000	1 laporan		1 laporan	916,920	1 laporan	983,608	1 laporan	1,055,149	1 laporan	1,131,897	1 laporan	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				60,499,000		50,000,000		450,916,920		500,983,608		501,055,149		501,131,897		501,131,897	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakt	Provinsi		
					Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Terkelompoknya penyusunan laporan keuangan	Dokumen	1 tahun	25,000,000	0	0	1	916,920	1	983,608	1	1,055,149	1	1,131,897	1	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	35,499,000	2	50,000,000	2	100,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
				Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				-		7,500,000		277,750,760		277,950,824		278,165,448		278,395,692		278,395,692	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakt	Provinsi		
					Persentase Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%	100%	-	100%	-	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Jumlah Dokumen Terkait Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal	Dokumen	0	0	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	2,750,760	1 dokumen	2,950,824	1 dokumen	3,165,448	1 dokumen	3,395,692	1 dokumen	3,395,692	RSUD Raja Ahmad Tabib			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				35,000,000		-		350,916,920		350,983,608		351,055,149		351,131,897		351,131,897	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakt	Provinsi		
					Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester RSUD RAT Hasil Koordinasi dengan Pihak Terkait	Laporan	1 Laporan	35,000,000	1 laporan	0	1 laporan	916,920	1 laporan	983,608	1 laporan	1,055,149	1 dokumen	1,131,897	1 dokumen	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-		-		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Persentase Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	%	100%	-	100%	-	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
			1 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	5,884,526,528	100%	-	100%	3,102,691,992	100%	3,563,360,789	100%	3,482,514,919	100%	3,605,189,727	100%	3,605,189,727	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				-		-		75,000,000		165,000,000		200,000,000		250,000,000		250,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Jumlah Dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	-	1	-	1	75,000,000	1	165,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				491,281,000		-		250,000,000		275,000,000		300,000,000		350,000,000		350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	98%	491,281,000	98%	-	98%	250,000,000	98%	275,000,000	98%	300,000,000	98%	350,000,000	98%	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				-		-		450,000,000		500,000,000		522,000,000		534,000,000		534,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Persentase Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	%	98%	-	98%	-	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	522,000,000	100%	534,000,000	100%	534,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				-		-		1,000,000,000		1,250,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	%	98%	-	98%	-	100%	1,000,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		-		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
									Tahun Dasar		Target														
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
						Persentase Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	98%	-	98%	-	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		451,691,992		458,360,789		465,514,919		473,189,727		473,189,727	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
						Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	98%	-	98%	-	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah dokumen Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah RS	Bulan	0	0	12	0	12	91,691,992	12	98,360,789	1 laporan	105,514,919	12	113,189,727		113,189,727	RSUD Raja Ahmad Tabib			
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			5,393,245,528		-		376,000,000		415,000,000		495,000,000		498,000,000		498,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	98%	5,393,245,528	98%	-	100%	376,000,000	100%	415,000,000	100%	495,000,000	100%	498,000,000	100%	498,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
			1	02	01	1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	273,233,000	100%	281,336,000	100%	2,607,876,453	100%	2,678,740,752	100%	2,789,541,272	100%	3,343,346,194	100%	3,343,346,194	Dinas Kesehatan	Provinsi
						Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		200,000,000		763,698,070		588,967,378		602,838,500		821,355,262		821,355,262	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
						Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		-		-	1	450,000,000	1	467,000,000	1	472,000,000	1	481,000,000	1	481,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	0	0	1	113,698,070	1	121,967,378	1	130,838,500	1	140,355,262	1	140,355,262	RSUD Raja Ahmad Tabib			
						Jumlah Persentase Kecukupan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sesuai Dengan Jumlah Pegawai	%	100%	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	-	100%	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		-		385,169,199		395,836,079		408,551,492		410,318,973		410,318,973	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
						Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%	100%	-	100%	-	100%	376,000,000	100%	386,000,000	100%	398,000,000	100%	399,000,000	100%	399,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah Laporan pendataan dan Pengolahan Pengadministrasian Kepegawaian RS	Laporan	0	-	1	-	1	9,169,199	1	9,836,079	1	10,551,492	1	11,318,973	1	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib			
						Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai			-		-		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1		1		1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			262,585,000		31,336,000		595,670,786		798,265,137		827,048,297		894,034,015		894,034,015	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
						Persentase Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	90%	262,585,000	90%	-	90%	560,000,000	90%	760,000,000	90%	786,000,000	90%	850,000,000	90%	850,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	65%	-	70%	31,336,000	75%	35,670,786	75%	38,265,137	80%	41,048,297	85%	44,034,015	1	44,034,015	RSUD Raja Ahmad Tabib			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			-		-		354,169,199		359,836,079		375,551,492		389,318,973		389,318,973	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
						Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	0	-	0	-	1	345,000,000	1	350,000,000	1	365,000,000	1	378,000,000	1	378,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	0	0	1	0	1	9,169,199	1	9,836,079	1	10,551,492	1	11,318,973	1	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun Dasar		2022		2023		2024		2025		2026					
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				10,648,000		50,000,000		209,169,199		235,836,079		275,551,492		528,318,973		528,318,973	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi
				Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	0	-	0	-	1	150,000,000	1	176,000,000	1	215,000,000	1	467,000,000	1	467,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
				Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (SINIFES) yang Memadai per Tahun	Dokumen	1	10,648,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
				Jumlah pengadaan pendukung administrasi Pegawai RS RAT	Paket	0	0	Paket	0	Paket	9,169,199	Paket	9,836,079	Paket	10,551,492	Paket	11,318,973	Paket	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib		
			1 02 01 1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,327,623,930	100%	4,469,924,000	100%	5,100,680,926	100%	5,972,909,521	100%	5,795,026,290	100%	6,814,800,877	100%	6,814,800,877	Dinas Kesehatan	Provinsi
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor				199,533,930		417,500,000		288,687,467		343,792,144		377,122,770		402,695,799		402,695,799	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sak	Provinsi
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Paket	0	-	1	180,000,000	1	46,000,000	1	98,000,000	1	128,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
				Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD RAT	Paket	0	-	1	37,500,000	1	42,687,467	1	45,792,144	1	49,122,770	1	52,695,799	1	52,695,799	RSUD Raja Ahmad Tabib		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100%	199,533,930	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor				50,000,000		448,500,000		254,698,070		378,967,378		392,838,500		215,355,262		215,355,262	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sak	Provinsi
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Paket	0	-	1	248,500,000	1	141,000,000	1	257,000,000	1	262,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor pada RSUD RAT	Paket	1	50,000,000	1	200,000,000	1	113,698,070	1	121,967,378	1	130,838,500	1	140,355,262	1	140,355,262	RSUD Raja Ahmad Tabib		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	50,000,000		401,916,623		406,056,193		410,497,027		415,261,065		415,261,065	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sak	Provinsi	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	0	-	0	-	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
				Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga pada RSUD RAT	Paket	0	-	1	50,000,000	1	56,916,623	1	61,056,193	1	65,497,027	1	70,261,065	1	70,261,065	RSUD Raja Ahmad Tabib		
				Penyediaan Bahan logistik kantor				490,000,000		642,000,000		662,499,737		754,337,156		811,982,161		943,566,390		943,566,390	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sak	Provinsi
				Tersedianya Bahan logistik kantor	Paket	0	-	1	222,000,000	1	201,000,000	1	268,000,000	1	299,000,000	1	402,000,000	1	402,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
				Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor pada RSUD RAT	Bulan	1 tahun	450,000,000	1 Tahun	300,000,000	12	341,499,737	12	366,337,156	12	392,982,161	12	421,566,390	12	421,566,390	RSUD Raja Ahmad Tabib		
				Tercukupinya Kebutuhan ATK dan Perlengkapan Kantor Lainnya	%	100%	40,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50,000,000		537,000,000		449,956,633		518,491,926		562,073,726		544,134,549		544,134,549	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sak	Provinsi
				Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Paket	0	-	1	362,000,000	1	215,600,000	1	228,000,000	1	265,000,000	1	240,000,000	1	240,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
				Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada RSUD RAT	Kegiatan	1	-	1	75,000,000	1	84,356,633	1	90,491,926	1	97,073,726	1 tahun	104,134,549	1 tahun	104,134,549	RSUD Raja Ahmad Tabib		
				Tercukupinya Dokumen Pasien per Tahunnya	%	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				35,000,000		230,000,000		195,916,920		315,983,608		221,155,149		281,331,897		281,331,897	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sak	Provinsi
				Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	%	0	-	100%	180,000,000	100%	145,000,000	100%	240,000,000	100%	120,100,000	100%	130,200,000	100%	130,200,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
				Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada RSUD RAT	Bulan	12	35,000,000	0	0	12	916,920	12	983,608	12	1,055,149	12	1,131,897	12	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib		
				Tercukupinya Kebutuhan Koran RS Setiap Tahunnya	%	100%	-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	75,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	RSUD EHD	Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi											
							Tahun Dasar		2021				2022				2023				2024				2025				2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23														
				Penyediaan Bahan/material					-		-		278,000,000		345,000,000		420,000,000		467,000,000		467,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi											
				Ketersediaan Bahan material		Bulan	0		-	0		-	12		278,000,000	12	345,000,000	12	420,000,000	12	467,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi											
				Fasilitasi Kunjungan Tamu					69,420,000		240,000,000		217,458,311		363,528,096		419,748,513		470,130,532		470,130,532	Dinas Kesehatan Dan Rumah Saka	Provinsi											
				Terlaksannya Fasilitas Kunjungan Tamu		Bulan	0		-	12		165,000,000	12		89,000,000	12	213,000,000	12	267,000,000	12	315,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi											
				Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Kunjungan Tamu pada RSUD RAT		Bulan	12		20,000,000	12		25,000,000	12		28,458,311	12	30,528,096	12	32,748,513	12	35,130,532	12	35,130,532	RSUD Raja Ahmad Tabib										
				Tersedianya Makan Minum Tamu dan Rapat		%	100%		49,420,000	100%		50,000,000	100%		100,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	RSUD EHD	Provinsi									
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					433,670,000		1,534,924,000		1,601,547,165		1,771,753,020		1,404,608,443		2,220,325,384		2,220,325,384	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi											
				Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1		168,720,000	1		1,040,000,000	1		980,450,670	1	1,020,030,000	1	520,030,000	1	1,200,500,300	1	1,200,500,300	Dinas Kesehatan	Provinsi									
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi Terkait pada RSUD RAT		Laporan	1 Laporan		200,000,000	1 Laporan		369,924,000	1 Tahun		421,096,495	1 laporan	451,723,020	1 laporan	484,578,443	1 laporan	519,825,084	1 laporan	519,825,084	RSUD Raja Ahmad Tabib										
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam dan Luar Daerah)		%	100%		64,950,000	100%		125,000,000	100%		200,000,000	100%	300,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi									
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					-		370,000,000		250,000,000		275,000,000		275,000,000		355,000,000		355,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi											
				Jumlah Penatausan Arsip Dinamis		Laporan	1		-	1		370,000,000	1		250,000,000	1	275,000,000	1	275,000,000	1	355,000,000	1	355,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi									
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					-		-		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi											
				Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Laporan	1		-	1		-	1		500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi									
			1 02 01 1.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		5,219,870,000	100%		992,884,100	100%		3,862,341,972	100%	4,494,962,761	100%	4,975,902,218	100%	87,661,620,785	100%	5,265,617,700	Dinas Kesehatan	Provinsi									
				Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					-		-		430,000,000		646,721,578		451,700,000		696,579,754		696,579,754	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi											
				tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Paket	0		-	0		-	1		430,000,000	1	450,000,000	1	451,700,000	1	470,200,300	1	470,200,300	Dinas Kesehatan	Provinsi									
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Paket	0		-	0		-	0		0	1	196,721,578	1	-	1	226,379,454	1	226,379,454	RSUD Raja Ahmad Tabib										
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan					-		-		727,703,984		946,500,000		767,729,839		1,358,100,000		1,358,100,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi											
				tersedianya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Paket	0		-	0		-	1		544,320,000	1	546,500,000	1	556,700,000	1	558,100,000	1	558,100,000	Dinas Kesehatan	Provinsi									
				Jumlah Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan		Paket			0		-	1		183,383,984	1	0	1	211,029,839	1	0	1	-	RSUD Raja Ahmad Tabib											
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit	1		-	1		-	1		-	1	400,000,000	1	-	1	800,000,000	1	800,000,000	RSUD EHD	Provinsi									
				Pengadaan Mebel					99,870,000		416,504,700		559,269,199		585,036,079		1,090,751,492		603,618,973		603,618,973	Dinas Kesehatan Dan Rumah Saka	Provinsi											
				Jumlah Pengadaan Mebel		Paket	0		-	1		316,504,700	1		350,100,000	1	375,200,000	1	880,200,000	1	392,300,000	1	392,300,000	Dinas Kesehatan	Provinsi									
				Jumlah kegiatan Pengadaan Mebel pada RSUD RAT		Paket	0		-	1		-	1		9,169,199	1	9,836,079	1	10,551,492	1	11,318,973	1	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib										



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23		
					Tercukupinya Anggaran Untuk Perbaikan Mebel RS Setiap Tahunnya	%	100%	99,870,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5,050,000,000		346,379,400		594,507,598		718,508,237		723,654,476		82,980,813,359		698,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakt	provinsi		
					Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	0	-	1	346,379,400	1	567,000,000	1	689,000,000	1	692,000,000	1	698,000,000	1	698,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Jumlah Pengadaan Alat/Perangkt Sistem Informasi Kesehatan (VideoTron,SolarPanel/SolarCell dan Dashboard Informasi)	Paket	0	5,050,000,000	0	0	0	27,507,598	0	29,508,237	0	31,654,476	0	33,956,918	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya			70,000,000		230,000,000		441,691,992		473,360,789		783,514,919		863,189,727		750,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakt	provinsi		
					Persentase pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya	%	0	-	100%	230,000,000	100%	350,000,000	100%	375,000,000	100%	678,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Terlaksananya Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Paket	0	70,000,000	0	0	0	91,691,992	0	98,360,789	0	105,514,919	0	113,189,727	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		450,000,000		465,000,000		498,000,000		498,000,000		498,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	0	-	0	-	100%	450,000,000	100%	465,000,000	100%	498,000,000	100%	498,000,000	100%	498,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		650,000,000		650,000,000		650,000,000		650,000,000		650,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	0	-	0	-	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor			-		-		9,169,199		9,836,079		10,551,492		11,318,973		11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Jumlah Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Paket	0	-	1 Unit		1 unit	9,169,199	1 unit	9,836,079	1 unit	10,551,492		11,318,973	-	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib			
			1 02 01 1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	10,797,596,500	100%	13,915,470,600	100%	15,997,499,530	100%	17,353,758,312	100%	18,827,154,539	100%	20,430,765,521	100%	20,430,765,521	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20,000,000		25,000,000		303,458,311		305,528,096		307,748,513		310,130,532		310,130,532	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakt	provinsi		
					Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	100%	-	100%		100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Jasa Pengiriman pada RSUD RAT	Bulan	12	20,000,000	12	25,000,000	12	28,458,311	12	30,528,096	12	32,748,513	12	35,130,532	12	35,130,532	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8,027,596,500		4,848,468,100		5,565,902,613		5,971,575,114		6,399,757,875		6,830,059,108		6,830,059,108	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakt	provinsi		
					Jumlah ketersediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 bulan	-	12 bulan	310,640,000	12 bulan	253,200,000	12 bulan	274,300,000	12 bulan	297,200,000	12 bulan	300,000,000	12 bulan	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Tersedianya Pembayaran Listrik, Air, Telpin, Internet dan TV Kabel	Bulan	12	6,828,000,000	12	3,437,223,100	12	3,912,702,613	12	4,197,275,114	12	4,502,557,875	12	4,830,059,108	12	4,830,059,108	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Tersedianya Telpin, Internet, Air Bersih dan Listrik RS	%	100%	1,199,596,500	100%	1,100,605,000	100%	1,400,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,600,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
					Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			-		295,000,000		380,258,357		532,459,060		734,819,923		987,352,610		987,352,610	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakt	Provinsi		
					Jumlah ketersediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bulan	12 bulan	-	12 bulan	260,000,000	12 bulan	350,000,000	12 bulan	500,000,000	12 bulan	700,000,000	12 bulan	950,000,000	12 bulan	950,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun Dasar		Target															
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
					Tersedianya Jasa Sewa Mesin Fotocopy dan Mesin Lainnya, Jasa Sewa Rumah Dinas, dan Jasa Sewa Gudang	Bulan	0	0	12	35,000,000	12	30,258,357	12	32,459,060	12	34,819,923	12	37,352,610	12	37,352,610	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,750,000,000		8,747,002,500		9,747,880,248		10,544,196,042		11,384,828,227		12,303,223,270		12,303,223,270	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12 bulan	-	12 bulan	2,995,010,000	12 bulan	3,200,200,500	12 bulan	3,520,300,800	12 bulan	3,850,060,080	12 bulan	4,220,400,900	12 bulan	4,220,400,900	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Tersedianya Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan jasa kemanana pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Bulan	5	2,750,000,000		5,751,992,500	12		6,547,679,748		7,023,895,242		7,534,768,147		8,082,822,370	12	8,082,822,370	RSUD Raja Ahmad Tabib		
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	5,439,037,395	100%	2,727,761,100	100%	9,194,247,803	100%	10,084,722,014	100%	11,520,453,280	100%	11,534,095,042	100%	12,759,095,042	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300,000,000		819,626,900		410,226,845		443,150,721		466,550,998		502,940,523		502,940,523	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
					Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan	Bulan	0	-	12	670,350,000	12	246,900,000	12	267,400,000	12	278,200,000	12	301,800,000	12	301,800,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (2 Direktur, 3 Wadir, 4 Pejabat Eselon Lainnya dan 1 Ketua Komite Medik)	Bulan	12	300,000,000	12	29,276,900	12	33,326,845	12	35,750,721	12	38,350,998	12	41,140,523	12	41,140,523	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan aktif (hidup)	%	100%	-	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%	140,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115,983,595		223,685,000		1,120,749,868		1,183,168,578		1,196,491,081		1,210,783,195		1,210,783,195	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
					Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	0	-	0	-	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan (2 Pick Up, 5 Ambulance, 2 Mobil Jenazah, 7 Motor Operasional)	Bulan	12	-	12	150,000,000	12	170,749,868	12	183,168,578	12	196,491,081	12	210,783,195	12	210,783,195	RSUD Raja Ahmad Tabib			
					Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100%	115,983,595	100%	73,685,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
					Pemeliharaan Mebel				-		-	50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		0		12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				453,497,400		405,065,400		675,000,000		1,000,000,000		1,078,000,000		675,000,000		1,175,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
					Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Bulan	0	-	12	205,000,000	12	375,000,000	12	500,000,000	12	578,000,000	12	675,000,000	12	675,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100%	453,497,400	100%	200,065,400	100%	300,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
					Tersedianya Perijinan Sarana dan Prasarana RS	%	100%	-	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	RSUD EHD	Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun Dasar		2022		2023		2024		2025		2026		2026						
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					4,173,000,000	-		626,518,705		682,083,942		738,054,199		764,458,972		764,458,972	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
					Tersedianya pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Bulan	0	-	0	-	12	550,000,000	12	600,000,000	12	650,000,000	12	670,000,000	12	670,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
					TerTersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan Rumah Sakit Tersedianya retribusi dan iuran sampah rumah sakit	egiatan /Bulan	12	4,173,000,000	-	-	-	76,518,705	-	82,083,942	-	88,054,199	-	94,458,972	-	94,458,972	RSUD Raja Ahmad Tabib				
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					296,647,400	200,000,000		300,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
					Tersedianya gedung/bangunan RS dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100%	296,647,400	100%	200,000,000	100%	300,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					99,909,000	100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	RSUD EHD	Provinsi		
					Tersedianya Soft Ware SIMRS dan Internet RS dalam kondisi baik	%	100%	99,909,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	339,691,900		2,311,752,384		2,426,318,773		3,591,357,002		4,655,912,352		4,655,912,352	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
					Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	0%	-	0%	-	100%	2,111,752,384	100%	1,926,318,773	100%	3,091,357,002	100%	4,155,912,352	100%	4,155,912,352	100%	4,155,912,352	Dinas Kesehatan	Provinsi	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100%	-	100%	339,691,900	100%	200,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	339,691,900		3,300,000,000		3,400,000,000		3,500,000,000		3,500,000,000		3,500,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
					Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	0%	-	0%	-	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
					Tersedianya jasa kebersihan lingkungan RS	%	100%	-	100%	339,691,900	100%	1,300,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	1	2,750,760	1	2,950,824	1	3,165,448	1	3,395,692	1	3,395,692	1	3,395,692	RSUD Raja Ahmad Tabib		
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					-		1,833,840		1,967,216		2,110,298		2,263,795		2,263,795		2,263,795	RSUD Raja Ahmad Tabib		
					Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan RSUD RAT	Laporan	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	1,833,840	1 laporan	1,967,216	1 laporan	2,110,298	1 laporan	2,263,795	1 laporan	2,263,795	1 laporan	2,263,795	RSUD Raja Ahmad Tabib		
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					-	-	916,920		983,608		1,055,149		1,131,897		1,131,897		1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib		
					Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Pendapatan RS serta Dokumen Kebijakan Terkait Pendapatan RS	Laporan	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	916,920	1 laporan	983,608	1 laporan	1,055,149	1 laporan	1,131,897	1 laporan	1,131,897	1 laporan	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib		
					Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Dokumen	1	126,066,785,680	1	55,001,059,919	1	60,178,316,292	1	63,745,962,921	1	68,036,862,875	1	72,067,274,451	1	72,067,274,451	1	72,067,274,451	RSUD EHD	Provinsi
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					109,545,908,351	37,500,000,000		42,178,316,292		45,245,962,921		48,536,862,875		52,067,274,451		52,067,274,451		52,067,274,451	RSUD Raja Ahmad Tabib	
					Jumlah kunjungan pasien dalam 1 tahun RSUD Raja Ahmad Tabib	Kunjungan	60,000	109,545,908,351	61,000	37,500,000,000	62,000	42,178,316,292	63,000	45,245,962,921	64,000	48,536,862,875	65,000	52,067,274,451	65,000	52,067,274,451	65,000	52,067,274,451	RSUD Raja Ahmad Tabib		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun Dasar		2022				2023		2024		2025		2026		2026			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				16,520,877,329		17,501,059,919		18,000,000,000		18,500,000,000		19,500,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
						Jumlah Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Dokumen	1	16,520,877,329	1	17,501,059,919	1	18,000,000,000	1	18,500,000,000	1	19,500,000,000	1	20,000,000,000	1	20,000,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
			1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	128	82,931,908,100	125	116,896,449,648	124	79,152,788,287	123	49,621,545,229	122	57,642,571,884	121	66,690,953,952	121	66,690,953,952	Dinas Kesehatan	Provinsi
						Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	15		14		13		12		11		10		10		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16.30%		15.8%		15.3		14		13.3		12.8		12.8		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	2 Kab/Kota		2 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	90%		90%		92%		92%		93%		93%		93%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	60%		64%		68%		72%		76%		80%		80%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43%		43%		43%		57.14%		57.14%		67%		67%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92.90%		93.60%		94.10%		94.60%		95.00%		95.50%		95.50%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	57%		57%		71%		71%		71%		71%		71%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	87.88%		89%		90%		91%		92%		93%		93%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Persentase Puskesmas terakreditasi	%	95.50%		96%		97%		97%		97.50%		98%		98%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	90%		92%		94%		96%		96%		96%		96%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
						Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Internasional		Internasional		Internasional		RSUD RAT	Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun Dasar		2022				2023		2024		2025		2026						
							2021		2022		2023		2024		2025		2026								
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	2	3	4		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
						Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	-		Satelit		Satelit		Utama		Utama		Utama		Utama		RSUD RAT	Provinsi		
						Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		RSUD RAT	Provinsi		
						Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Indeks	78.5		78.5		79		80		80		80		80		RSUD EHD	Provinsi		
						Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Indeks	80		81		82		83		84		84		84		RSUD EHD	Provinsi		
			1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	70%	33,157,377,243	73%	62,760,407,912	75%	46,693,285,587	80%	25,171,303,259	85%	28,184,518,831	90%	37,804,023,328	100%	37,804,023,328	Dinas Kesehatan	Provinsi
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			414,800,000		8,000,000,000		6,700,000,000		4,000,000,000		500,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
						Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	Paket	1	214,800,000	1	8,000,000,000	1	6,700,000,000	1	4,000,000,000	1	500,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Tersedianya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tahun	1 Tahun	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Raja Ahmad Tabib			
						Pengembangan Rumah Sakit			840,000,000		800,000,000		3,800,000,000		1,150,000,000		1,350,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
						Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	Paket	0		0		1	3,000,000,000	1	300,000,000	1	500,000,000	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah pengembangan Rumah Sakit Pendidikan	Fakultas Kedokteran		840,000,000	1 Fakultas Kedokteran	800,000,000	2 Fakultas Kedokteran	800,000,000	2 Fakultas Kedokteran	850,000,000	3 Fakultas Kedokteran	850,000,000	3 Fakultas Kedokteran	1,000,000,000	3 Fakultas Kedokteran	1,000,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib			
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-		-		1,000,000,000		300,000,000		500,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	0		0		1	1,000,000,000	1	300,000,000	1	500,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			-		-		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Paket	0		0		1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK, Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)			-		-		400,000,000		400,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK, Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Kab/Kota	0		0		1	400,000,000	1	400,000,000	2	700,000,000	2	700,000,000	2	700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (regional maintenance center)			-		-		500,000,000		172,061,139		172,061,139		172,061,139		172,061,139	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (regional maintenance center)	%	10%	-	30%		60%	500,000,000	70%	172,061,139	80%	172,061,139	85%	172,061,139	85%	172,061,139	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			800,000,000		-		200,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
						Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kegiatan	0		0		1	200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target																		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun Dasar		2022				2023				2024				2025				2026					
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026											
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
1	2	3	4			5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
						Tertaksananya Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Kegiatan	1	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib									
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			142,569,610		2,000,000,000		2,100,000,000		1,800,000,000		2,500,000,000		3,260,000,000		3,260,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	provinsi							
						Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kegiatan	0		0		1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi							
						persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	%	1	142,569,610	100%	2,000,000,000	100%	1,800,000,000	100%	1,500,000,000	100%	2,200,000,000	100%	2,960,000,000		2,960,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib								
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			13,347,673,266		9,507,320,701		4,922,830,477		2,800,200,000		3,000,250,000		3,600,300,000		3,600,300,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	provinsi							
						Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	1	10,034,501,866	1	4,500,000,000	1	1,122,830,477	1	800,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi							
						Persentase ketersediaan Pengadaan alat kesehatan / Alat Penunjang Medik di RSUD RAT	%	50 Persen	1,581,000,000	55 Persen	3,500,000,000	60 Persen	800,000,000	65 Persen	1,000,200,000	70 Persen	1,000,250,000	75 Persen	1,600,300,000	75 Persen	1,600,300,000	RSUD Raja Ahmad Tabib								
						Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	70%	1,732,171,400	75%	1,507,320,701	80%	3,000,000,000	85%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	90%	1,000,000,000	90%	1,000,000,000	RSUD EHD	Provinsi							
						Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan			224,077,000		1,000,000,000		2,800,000,000		1,400,000,000		1,500,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi							
						Persentase Puskesmas yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	%	65%	-	70%		70%	1,300,000,000	73%	400,000,000	75%	500,000,000	80%	500,000,000	80%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi							
						Persentase RSUD yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	%	65%	-	72%		73%		75%		77%		77%		77%		Dinas Kesehatan	Provinsi							
						Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	70%	224,077,000	75%	1,000,000,000	80%	1,500,000,000	85%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	90%	1,500,000,000	90%	1,500,000,000	RSUD EHD	Provinsi							
						Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			5,765,520,000		1,000,000,000		2,000,000,000		1,250,000,000		1,450,000,000		2,050,000,000		2,050,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi							
						Jumlah Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	0		0		1	300,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi							
						Jumlah Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Paket	100%	5,000,000,000	0	-	1	200,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib								
						Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	70%	765,520,000	75%	1,000,000,000	80%	1,500,000,000	85%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	90%	1,500,000,000	90%	1,500,000,000	RSUD EHD	Provinsi							
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			1,000,000,000		935,028,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib								
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kegiatan	0		0		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi							
						Persentase alat kesehatan yang telah dikalibrasi pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	100%	1,000,000,000	100%	935,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib								
						Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Seprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)			2,936,232,600		1,900,000,000		2,450,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000	Rumah Sakit								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026									
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
1	2	3	4			5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
						Jumlah kegiatan pengadaan Bahan Habis Pakai BHP Non Medis pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Paket	1 Paket	1,000,000,000	11	1 Paket	400,000,000	14	1 Paket	450,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	19	1 Kegiatan	500,000,000	21	1 Kegiatan	500,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib						
						Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	70%	1,936,232,600	11	75%	1,500,000,000	14	80%	2,000,000,000	15	85%	1,500,000,000	18	85%	1,500,000,000	20	90%	2,500,000,000	21	90%	2,500,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
						Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan			-	11	-	-	14		150,000,000	16		150,000,000	19		150,000,000	21		150,000,000	22		150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
						Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan	0		11	0		14	1	150,000,000	15	1	150,000,000	18	1	150,000,000	20	1	150,000,000	21	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
						Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			-	11	-	-	14		150,000,000	16		150,000,000	19		150,000,000	21		150,000,000	22		150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
						Jumlah Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan	0		11	0		14	1	150,000,000	15	1	150,000,000	18	1	150,000,000	20	1	150,000,000	21	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			2,630,177,267	11		4,991,396,011	14		2,120,000,000	15		2,790,000,000	18		2,985,000,000	20		4,676,000,484	21		4,676,000,484	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
						Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan	1	2,630,177,267	11	1	4,991,396,011	14	1	750,000,000	15	1	400,000,000	18	1	400,000,000	20	1	400,000,000	21	1	400,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
						Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan	0	0	11	1 Kegiatan	500,000,000	14	1 Kegiatan	1,370,000,000	15	1 Kegiatan	2,390,000,000	18	1 Kegiatan	2,585,000,000	20	1 Kegiatan	4,276,000,484	21	1 Kegiatan	4,276,000,484	RSUD Raja Ahmad Tabib		
						Persentase alat kesehatan yang telah dikalibrasi pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	0	-	11	0	-	14	100%		100%		100%		100%		100%		100%		-	RSUD Raja Ahmad Tabib			
						Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			4,901,000,000	11		7,785,000,000	14		8,159,694,679	15		5,199,042,120	18		10,002,207,692	20		9,780,661,705	21		9,780,661,705	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit		
						Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	93%	-	11	94%	-	14	95%	1,200,000,000	15	96%	1,200,000,000	18	97%	1,200,000,000	20	97%	1,200,000,000	21	97%	1,200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
						Jumlah pengadaan Obat, Vaksin, makan dan minum pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Paket	3 Paket	1,701,000,000	11	3 Paket	1,785,000,000	14	3 Paket	1,800,000,000	15	3 Paket	2,146,663,297	18	3 Paket	2,460,000,000	20	3 Paket	2,500,000,000	21	3 Paket	2,500,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
						Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman RSUD EHD	Paket	10%	3,200,000,000	11	8%	6,000,000,000	14	3	5,159,694,679	15	4%	1,852,378,823	18	2%	6,342,207,692	20	2%	6,080,661,705	21	2%	6,080,661,705	RSUD EHD	Provinsi	
						Pembangunan Rumah Sakit Berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			155,327,500	11		24,841,663,200	14		8,430,760,431	15		500,000,000	18		-	20		-	21		-	RSUD Raja Ahmad Tabib		
						Jumlah Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Gedung		155,327,500	11	1 Gedung	24,841,663,200	14	1 Gedung	8,430,760,431	15	1 Gedung	500,000,000	18	0	0	20	0	0	0	21	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	
						Pengadaan Barang Penunjang Operasional RS			-	11		-	14		300,000,000	15		300,000,000	18		400,000,000	20		450,000,000	21		450,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
						Jumlah Pengadaan Pendukung Penunjang Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik non medik pada RSUD Raja	Paket			11	1	-	14	1	300,000,000	15	1	300,000,000	18	1 Paket	400,000,000	20	1 Paket	450,000,000	21	1 Paket	450,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
						Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	11		-	14		10,000,000	15		10,000,000	18		25,000,000	20		15,000,000	21		15,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
						Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan telemedicine di RSUD Raja Ahmad Tabib	Laporan	0	-	11	1	-	14	1	10,000,000	15	1	10,000,000	18	1	25,000,000	20	1	15,000,000	21	1	15,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun Dasar		Target														
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
1	2	3	4				5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	target	20	21	22	23		
			1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	80%	48,349,332,457	83%	50,556,225,947	86%	28,197,302,700	88%	20,609,795,970	90%	25,692,423,093	95%	24,627,952,463	95%	24,627,952,463	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				5,020,974,056		5,168,500,000		1,750,000,000		1,000,000,000		2,125,000,000		1,750,000,000		1,750,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Saka	Provinsi	
								Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	3,394,534,620	100%	168,500,000	100%	750,000,000	100%	500,000,000	100%	625,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Jumlah Persentase Kematiian Pasien Yang Dirawat Dengan Kasus COVID-19 per Tahun	%	10%	1,626,439,436	8%	5,000,000,000	6%	1,000,000,000	4%	500,000,000	2%	1,500,000,000	2%	1,000,000,000	2%	1,000,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
								Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)			2,689,280,267		2,156,505,278		1,200,000,000		500,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100%	2,689,280,267	100%	2,156,505,278	100%	1,200,000,000	100%	500,000,000	100%	700,000,000	100%	700,000,000	100%	700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			422,365,900		1,290,000,000		1,946,000,000		990,000,000		1,290,000,000		1,300,000,000		1,300,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Saka	Provinsi	
								Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	91.0%	422,365,900	91.2%	1,290,000,000	91.3%	1,906,000,000	91.4%	950,000,000	91.5%	1,250,000,000	91.6%	1,250,000,000	91.6%	1,250,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3)	%	90.8%	-	90.9%	-	91.0%		91.2%		91.3%		91.4%		91.4%			Dinas Kesehatan	Provinsi
								Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Kab/Kota	5 Kab/Kota	-	6 Kab/Kota	-	6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota			Dinas Kesehatan	Provinsi
								Jumlah kegiatan dan pengembangan pelayanan kesehatan Ibu dan anak pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Kegiatan	-	-	1	0	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			-	-		350,000,000		150,000,000		201,847,256		50,000,000		50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
								Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	70%		72%		74%	350,000,000	74%	150,000,000	75%	201,847,256	76%	50,000,000	76%	50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			107,731,500		229,000,000		125,000,000		125,000,000		130,000,000		135,000,000		135,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	Kab/Kota	3 Laporan	107,731,500	7 Kab/kota	229,000,000	3 Laporan	125,000,000	3 Laporan	125,000,000	3 Laporan	130,000,000	3 Laporan	135,000,000	3 Laporan	135,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1,919,935,400		8,337,179,000		1,986,000,000		856,000,000		1,056,000,000		1,086,000,000		1,086,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	%	11%	1,919,935,400	10.80%	8,337,179,000	10.60%	1,986,000,000	10.40%	856,000,000	10.20%	1,056,000,000	10%	1,086,000,000	10%	1,086,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
								Prevalensi stunting	%	16.30%		15.80%		15.30%		14%		13.30%		12.80%		12.80%			Dinas Kesehatan	Provinsi
								Persentase Bumil KEK	%	13.20%		12.40%		11.40%		10.40%		9.40%		8.40%		8.40%			Dinas Kesehatan	Provinsi
								Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	59%		60%		61%		62%		63%		64%		64%			Dinas Kesehatan	Provinsi
								Persentase Kabkota Melaksanakan surveilans gizi	%	74%		77%		80%		83%		86%		89%		89%			Dinas Kesehatan	Provinsi



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun Dasar		2022				2023		2024		2025		2026		2026			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				66,791,400		130,000,000		300,000,000		165,000,000		300,000,000		165,000,000		165,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja	Kab/Kota	4 Kab/Kota	66,791,400	5 Kab/Kota	130,000,000	5 Kab/Kota	300,000,000	6 Kab/Kota	165,000,000	6 Kab/Kota	300,000,000	7 Kab/Kota	165,000,000	7 Kab/Kota	165,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan Olahraga	Kab/Kota	4 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				443,490,200		1,812,786,000		1,702,100,000		1,752,000,000		2,003,000,000		2,100,000,000		2,100,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
				Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	%	30%	443,490,200	30%	310,946,000	35%	500,000,000	40%	250,000,000	45%	500,000,000	50%	500,000,000	50%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	2 Kab/Kota		2 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Persentase sarana air minum yang diawasi/dperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	%	50%		60%		68%		72%		76%		80%		80%		Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	44%		50%		56%		62%		65%		68%		68%		Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	60%		65%		70%		75%		78%		80%		80%		Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	%	23.44%		35.16%		39.06%		46.88%		54.69%		62.50%		62.50%		Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Fasyankes	30 Fasyankes		32 Fasyankes		35 Fasyankes		40 Fasyankes		45 Fasyankes		50 Fasyankes		50 Fasyankes		Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Jumlah pengelolaan pengembangan pelayanan kesehatan lingkungan	Kegiatan	-	-	1	1,501,840,000	1	1,202,100,000	1	1,502,000,000	1	1,503,000,000	1	1,600,000,000	1	1,600,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib				
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2,376,398,760		1,080,000,000		1,500,000,000		970,000,000		1,250,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi		
				Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan	Kampanye	2 Kampanye	2,015,235,760	2 Kampanye	730,000,000	2 Kampanye	800,000,000	2 Kampanye	200,000,000	2 Kampanye	800,000,000	2 Kampanye	800,000,000	2 Kampanye	800,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar	Kab/Kota	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota						
				Jumlah Kegiatan promosi kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung	Kegiatan	12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Kegiatan	12 Kegiatan	250,000,000	12 Kegiatan	0	12 Kegiatan	200,000,000	12 Kegiatan	170,000,000	12 Kegiatan	250,000,000	12 Kegiatan	300,000,000	12 Kegiatan	300,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib				
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	%	80%	111,163,000	81%	350,000,000	82%	500,000,000	83%	600,000,000	84%	200,000,000	85%	300,000,000	85%	300,000,000	RSUD EHD	Provinsi			
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit				435,742,500		5,397,000,000		5,520,000,000		5,670,000,000		5,250,000,000		5,250,000,000		5,250,000,000	Rumah Sakit			
				Persentase kegiatan Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan dalam 1 tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Persen			100 Persen	4,697,000,000	100 Persen	4,700,000,000	100 Persen	4,750,000,000	100 Persen	4,750,000,000	100 Persen	4,750,000,000	100 Persen	4,750,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib				
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	%	80%	435,742,500	81%	700,000,000	82%	820,000,000	83%	920,000,000	84%	500,000,000	85%	500,000,000	85%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				112,998,900		175,000,000		500,000,000		201,668,000		741,927,120		760,284,934		760,284,934	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	%	50%	112,998,900	55%	175,000,000	65%	500,000,000	67%	201,668,000	69%	741,927,120	69%	760,284,934	69%	760,284,934	Dinas Kesehatan	Provinsi			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4			5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
						Jumlah RSUD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional integrasi	RS	2 RS			2 RS		3 RS		3 RS		3 RS		4 RS		4 RS	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi	%	35%			40%		43%		43%		57%		57%		57%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota	Unit	1			1		1		1		2		2		2	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					2,085,504,515		433,912,600		3,290,000,000		1,050,000,000		3,390,000,000		2,726,275,752		2,726,275,752	Dinas Kesehatan	Provinsi
						Persentase Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB pada Bumil dan Pengobatan Hep C sesuai dengan therapy	%			2,085,504,515	75%	433,912,600	80%	3,290,000,000	85%	1,050,000,000	90%	3,390,000,000	95%	2,726,275,752	95%	2,726,275,752	Dinas Kesehatan	Provinsi	
						Persentase wanita usia 30 - 50 tahun, Yang dilakukan skrining kanker payudara dan kanker serviks	%	4%			5%		10%		15%		20%		25%		25%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Posbindu	%	45%			50%		55%		60%		65%		70%		70%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Puskesmas yang melakukan Pelayanan Terpadu PTM	%	50%			55%		60%		65%		70%		75%		75%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	5%			3 Kab/Kota		4 Kab/Kota		5 Kab/Kota		6 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase puskesmas yang mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok	%	30%			35%		40%		45%		50%		55%		55%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Angka Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) sesuai target	%	35%			40%		43%		57%		71%		86%		86%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis/ Success Rate (SR)	%	90%			90%		90%		90%		90%		90%		90%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana Pneumonia sesuai Standar	%	52%			55%		90%		90%		90%		90%		90%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Insidensi HIV Per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	%	0,05			0,05		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	65%			70%		75%		80%		85%		95%		95%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase Kab/Kota yang mencapai API Malaria < 1 /per 1,000 penduduk	%	57%			71%		71%		86%		86%		86%		86%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94%			95%		95%		95%		95%		95%		95%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Persentase Kab/Kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk	%	29%			42.86%		42.86%		57.14%		57.14%		71.43%		71.43%	Dinas Kesehatan	Provinsi		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				11,730,000		115,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		225,000,000		225,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun Dasar		2022				2023		2024		2025		2026		2026			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
					Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	%	100%	11,730,000	100%	115,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	225,000,000	100%	225,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				-	20,000,000		219,500,000	224,135,000	229,409,050		234,426,322	234,426,322	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi						
					Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan layanan	%	30%	40%	20,000,000	50%	154,500,000	60%	159,135,000	70%	163,909,050	75%	168,826,322	75%	168,826,322	Dinas Kesehatan	Provinsi			
					Persentase penderita Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk usia ≥15 tahun yang mendapatkan layanan	%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Jumlah kegiatan dan pengembangan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Kegiatan		1 Kegiatan	65,000,000	1 Kegiatan	65,000,000	1 Kegiatan	65,500,000	1 Kegiatan	65,600,000	1 Kegiatan	65,600,000	RSUD Raja Ahmad Tabib						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA				90,730,000	20,000,000		217,102,700	228,812,970	241,694,267		255,863,694	255,863,694	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Persentase Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	%	41%	90,730,000	47%	20,000,000	54%	217,102,700	61%	228,812,970	67%	241,694,267	74%	255,863,694	74%	255,863,694	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				717,500,000	1,800,000,000	500,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Laporan	1	717,500,000	1	1,800,000,000	1	500,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				18,751,580,653	22,291,343,069	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	87.88%	18,751,580,653	89%	22,291,343,069	90%	5,000,000,000	91%	5,000,000,000	92%	5,000,000,000	93%	5,000,000,000	93%	5,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan daerah	orang	200 orang		200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	Dinas Kesehatan	Provinsi				
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				148,416,700	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan	Kab/Kota	7	148,416,700	7	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				69,581,700	100,000,000	535,600,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Pemenuhan pelaksanaan intervensi PIS PK di Puskesmas	%	25%	69,581,700	33%	100,000,000	48%	535,600,000	63%	300,000,000	70%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Persentase Kab/kota yang melaporkan SPM	%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Provinsi				
				Pembinaan pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				-	-	150,000,000	100,000,000	150,000,000	100,000,000	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pembinaan	%	68%	-	71%	-	74%	150,000,000	77%	100,000,000	80%	150,000,000	83%	100,000,000	83%	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
					Verifikasi dan penilaian kelayakan puskesmas untuk registrasi			-	-	206,000,000	212,180,000	218,545,400	225,101,762	225,101,762	225,101,762	225,101,762	225,101,762	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Validasi dan Evaluasi terhadap registrasi puskesmas yang sesuai dengan standar	Kab/Kota	1	-	2	-	3	206,000,000	5	212,180,000	6	218,545,400	7	225,101,762	7	225,101,762	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota				-	-	135,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Jumlah Laporan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	1	135,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				12,878,580,006	-	135,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi					
					Jumlah Laporan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Laporan	0	0	1	135,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Dasar		Target																Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
					Tersedianya Pendukung Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	Kegiatan	1 Kegiatan	12,878,580,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib						
				Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				-	-			285,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Jumlah Laporan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan	0		0		1	285,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
				Pengelolaan Penelitian Kesehatan				-	-			185,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Jumlah Laporan Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Laporan	0		0		1	185,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				-	-			10,000,000		-		-		-		-	RSUD Raja Ahmad Tabib							
					Tersedianya Penanganan Gawat Darurat 119 yang Terintegrasi dan Berstandar Internasional	Layanan					1	10,000,000							0	-	RSUD Raja Ahmad Tabib							
			1 02 02 1.03	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	%	25%	353,611,200	37%	2,920,507,217	43%	2,703,000,000	57%	2,571,470,000	65%	2,099,614,100	71%	2,438,452,523	71%	2,438,452,523	Dinas Kesehatan	Provinsi						
				Pengelolaan data dan informasi kesehatan				238,611,200		520,507,217		778,000,000		821,470,000		829,614,100		868,452,523		868,452,523	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi						
					Jumlah Laporan Data Kesehatan	Laporan	7 Laporan	188,611,200	7 Laporan	520,507,217	7 Laporan	728,000,000	7 Laporan	771,470,000	7 Laporan	779,614,100	7 Laporan	818,452,523	7 Laporan	818,452,523	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan profil kesehatan tepat waktu	%	70%		75%		80%		85%		90%		90%		90%		Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi (kehumasan) melalui media online	Laporan	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib							
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				115,000,000		2,100,000,000		800,000,000		1,100,000,000		700,000,000		900,000,000		900,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi						
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan	0		0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Jumlah Dokumen Pengelolaan dan dukungan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Dokumen	1 Dokumen	115,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib							
					Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan SIMRS Dibagi Total Jumlah Unit Kerja Dikali 100	%	45%	-	60%	2,000,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	RSUD EHD	Provinsi						
				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				-	-			525,000,000		350,000,000		270,000,000		170,000,000		170,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi						
					Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Paket	0		0		1	375,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Jumlah kegiatan penyediaan pendukung alat /perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib							
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit			-		300,000,000		600,000,000		300,000,000		300,000,000		500,000,000		500,000,000	RSUD EHD	Provinsi						
					Status Akreditasi RSUD EHD Yang Diberikan KARS Tahun Dimaksud	Paripurna	1	-	Paripurna	300,000,000	Paripurna	600,000,000	Paripurna	300,000,000	Paripurna	300,000,000	Paripurna	500,000,000	Paripurna	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun Dasar		2022		2023		2024		2025		2026				2026		
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
1	2	3	4				5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			1	02	02	1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	90%	1,071,587,200	91%	659,308,572	92%	1,559,200,000	93%	1,268,976,000	94%	1,666,015,860	95%	1,820,525,638	95%	1,820,525,638	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Pengendalian dan Pegawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				622,592,100		557,012,000		400,000,000		400,000,000		400,200,000		400,200,000		400,200,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
							Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi	RS	2 RS		622,592,100	2 RS	470,000,000	2 RS	350,000,000	2 RS	350,000,000	2 RS	350,000,000	2 RS	350,000,000	2 RS	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pegawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan	1		1		1		1		1		1		1			Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pelaksanaan Rumah Sakit Rujukan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	87,012,000	1 Laporan	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,200,000	1 Dokumen	50,200,000	1 Dokumen	50,200,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
							Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas kesehatan				248,995,100		102,296,572		959,200,000		768,976,000		999,345,280		620,325,638		620,325,638	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
							Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi RSUD	%	75%		248,995,100	80%	102,296,572	98%	659,200,000	98%	468,976,000	99%	699,345,280	99%	320,325,638	99%	320,325,638	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota	%	75%		-	80%		95%		96%		97%		98%		98%			Dinas Kesehatan	Provinsi
							Jumlah pendampingan akreditasi klinik	Klinik	0	-	5		10		15		20		25		25			Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	78.5%	0	78.5%	0	79%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
							Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				200,000,000		-		200,000,000		100,000,000		266,470,580		800,000,000		800,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
							Jumlah Dokumen pelaksanaan dan pengelolaan RS pendidikan dan akreditasi pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dokumen	1 Dokumen		200,000,000	0	0	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	266,470,580	1 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	800,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib		
			1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	50%	39,809,662,951	52%	31,448,460,606	54%	30,603,730,668	56%	25,590,270,959	58%	26,146,493,489	60%	27,706,819,010	60%	27,706,819,010	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat > 20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	60%			65%		70%		75%		80%		85%		85%			RSUD RAT	Provinsi
							Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat > 20jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	25%			30%		35%		40%		50%		60%		60%			RSUD EHD	Provinsi
			1	02	03	1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan	1	39,197,522,651	1	29,226,334,768	1	27,552,946,063	1	23,621,941,485	1	23,918,368,793	1	25,229,133,769	1	25,229,133,769	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				39,197,522,651		29,226,334,768		27,527,946,063		23,596,941,485		23,893,368,793		25,204,133,769		25,204,133,769	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi	
							Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan	%	72%		14,865,706,716	75%	13,961,748,324	78%	13,375,000,000	81%	13,425,000,000	83%	13,575,000,000	85%	13,675,000,000	85%	13,675,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Penghasilan Pegawai Non ASN Setiap Tahunnya	Bulan	12 Bulan		12,582,799,997	12 Bulan	4,814,406,854	12 Bulan	4,420,963,069	12 Bulan	3,248,129,613	12 Bulan	3,493,872,974	12 Bulan	4,144,133,477	12 Bulan	4,144,133,477	RSUD Raja Ahmad Tabib		
							Persentase pemenuhan kebutuhan SDM RSUD EHD	%	100%		11,749,015,938	100%	10,450,179,590	100%	9,731,982,994	100%	6,923,811,872	100%	6,824,495,819	100%	7,385,000,292	100%	7,385,000,292	RSUD EHD	Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target																		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun Dasar		Target																			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	-	-		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Tersedianya profil sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	1	-	1		1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000		25,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
			1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	80%	612,140,300	81%	2,222,125,838	82%	3,050,784,605	83%	1,968,329,474	84%	2,228,124,696	85%	2,477,685,241	85%	2,477,685,241	Dinas Kesehatan	Provinsi						
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				212,000,000		1,465,260,000		2,000,000,000		1,300,000,000		1,325,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi						
					Jumlah SDM Kesehatan Provinsi dengan sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang diterbitkan tahun berjalan	Sertifikat	90	-	90		680,000,000	90	500,000,000	90	100,000,000	90	125,000,000	90	300,000,000	90	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Laporan pelaksanaan Pendidikan/ Pelatihan/ Seminar pegawai	Laporan	1	-	1		-	1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi					
					Persentase pegawai yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib		%	60%	200,000,000	65%	285,260,000	70%	1,000,000,000	75%	700,000,000	80%	700,000,000	85%	700,000,000	85%	700,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib						
					Persentase Pegawai yang Mengikuti Dilat >20jam/Tahun pada RSUD Englu Haji Daud		%	25%	12,000,000	30%	500,000,000	35%	500,000,000	40%	500,000,000	50%	500,000,000	60%	500,000,000	60%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi					
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			400,140,300		756,865,838		1,050,784,605		668,329,474		903,124,696		977,685,241		977,685,241	Dinas Kesehatan Dan Rumah Saka	Provinsi						
					Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk jabatan fungsional kesehatan	PAK	150	300,140,300	150	274,125,838	150	500,784,605	150	168,329,474	150	403,124,696	150	527,685,241	150	527,685,241	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Persentase pegawai dinas kesehatan dengan nilai SKP minimal Baik		%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pegawai RSUD RAT dengan nilai SKP minimal Baik	%	100%	100,000,000	100%	182,740,000	100%	200,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib						
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai Unit Pelayanan Yang Sudah Dilakukan Kredensial Dibagi Total Jumlah Pegawai Dikali 100	%	100%	-	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	RSUD EHD	Provinsi					
			1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	75.44%	-	86%	250,000,000	87%	250,000,000	88%	100,000,000	89%	150,000,000	90%	150,000,000	90%	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
			1 02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalar Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalar Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha	%	75	-	77	100,000,000	79	150,000,000	81	65,000,000	83	65,000,000	85	95,000,000	85	95,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			-		100,000,000		100,000,000		40,000,000		40,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun Dasar		2021						2022		2023		2024		2025				2026	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
					Persentase pengawasan sarana distribusi alat kesehatan dan farmasi cabang pasca penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK	%	80%		82%	100,000,000	84%	100,000,000	86%	40,000,000	88%	40,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik				-		-		50,000,000		25,000,000		25,000,000		45,000,000		45,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
					Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Laporan	0		0		1	50,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
			1 02 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	5%	-	10%	150,000,000	15%	100,000,000	20%	35,000,000	23%	85,000,000	25%	55,000,000	25%	55,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				-		150,000,000		50,000,000		20,000,000		50,000,000		35,000,000		35,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
					Persentase pengawasan sarana UKOT pasca penerbitan Izin UKOT	%	5%		10%	150,000,000	15%	50,000,000	20%	20,000,000	23%	50,000,000	25%	35,000,000	25%	35,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik				-		-		50,000,000		15,000,000		35,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
					Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Laporan	0		0		1	50,000,000	1	15,000,000	1	35,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
			1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	57%	3,214,059,900	71.43%	2,707,166,635	71.43%	916,238,550	85.71%	633,962,090	85.71%	1,207,877,061	100%	1,219,265,427	100%	1,219,265,427	Dinas Kesehatan	Provinsi				
			1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	%	70	3,146,359,400	75	2,325,000,000	80	566,238,550	85	233,962,090	90	607,877,061	95	700,000,000	95	700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				3,146,359,400		2,325,000,000		566,238,550		233,962,090		607,877,061		700,000,000		700,000,000	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit	Provinsi				
					Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan	%	42%	3,071,359,400	57%	2,325,000,000	71%	566,238,550	71%	233,962,090	85%	607,877,061	100%	700,000,000	100%	700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi				
					Jumlah Pelaksanaan Kampanye Kesehatan	Laporan	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi				
					Jumlah Posyandu yang menerapkan digitalisasi Posyandu	Posyandu	0		20		50		100		200		350		350		Dinas Kesehatan	Provinsi				
					Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan Posyandu Aktif	%	14%		28%		42%		57%		71%		85%		85%		Dinas Kesehatan	Provinsi				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21				
1	2	3	4			5	6	7	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	22	23						
							Jumlah pelaksanaan kegiatan Asistensi, Advokasi dan Implementasi Perencanaan Pembangunan	Kegiatan	100%	75,000,000	0	0	0	15	0	0	0	19	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib			
			1	02	05	1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi	Kab/Kota	7	67,700,500	7	232,166,635	7	200,000,000	7	200,000,000	7	400,000,000	7	319,265,427	7	319,265,427	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				67,700,500		232,166,635		200,000,000		200,000,000		400,000,000		319,265,427		319,265,427	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	7	67,700,500	100	232,166,635	100	200,000,000	100	200,000,000	100	400,000,000	100	319,265,427	100	319,265,427	Dinas Kesehatan	Provinsi		
			1	02	05	1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	%	60	-	65	150,000,000	70	150,000,000	75	200,000,000	80	200,000,000	85	200,000,000	85	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				-		150,000,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
							Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Laporan	0	-	0	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
JUMLAH											396,347,467,306	318,501,213,099	311,432,378,631	291,128,886,787	316,078,195,383	424,623,717,360	342,550,450,480	Dinas Kesehatan	Provinsi							

Tanjungpinang, 15 Desember 2021

KEMALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 0001 SKM, M.Kes  
Perencanaan Utama Muda / IV.c  
NIP. 19710109 199501 1 001





**LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan																Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar				Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	23,007,032,094	100	34,413,356,321	100	48,079,210,554	100	51,647,131,573	100	55,480,041,292	100	59,597,636,227	100	59,597,636,227	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		100%	392,812,879	100%	1,371,764,853	100%	2,308,500,000	100%	2,778,500,000	100%	3,182,170,310	100%	3,484,500,000	100%	3,484,500,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100%	22,000,000	100%	272,000,000	100%	75,000,000	100%	150,000,000	100%	250,000,000	100%	495,000,000	100%	495,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	250,000,000	100%	267,800,000	100%	190,170,310	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	%	100%	358,512,879	100%	575,000,000	100%	813,500,000	100%	845,700,000	100%	891,000,000	100%	894,500,000	100%	894,500,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
	Persentase Satker Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengusulkan kegiatan DAK	%	80%	-	82%	-	84%		85%		86%		87%		87%		Dinas Kesehatan	Provinsi	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen DPA-Perubahan SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	235,000,000	100%	350,000,000	100%	500,000,000	100%	525,000,000	100%	525,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100%	-		-	100%	235,000,000	100%	350,000,000	100%	500,000,000	100%	525,000,000	100%	525,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80%		82%		84%		85%		86%		87%		87%		Dinas Kesehatan	Provinsi	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	12,300,000	100%	524,764,853	100%	425,000,000	100%	540,000,000	100%	576,000,000	100%	670,000,000	100%	670,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					2021		2022		2023		2024		2025					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda/Rakorpm yang disusun	Dokumen	0	-	1	-	1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	16,298,387,687	100%	24,940,207,368	100%	23,884,187,000	100%	24,961,582,000	100%	26,057,323,900	100%	27,201,722,375	100%	27,201,722,375	Dinas Kesehatan	Provinsi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan	%	100%	15,496,547,687	100%	22,155,287,368	100%	20,559,000,000	100%	21,586,950,000	100%	22,666,297,500	100%	23,799,612,375	100%	23,799,612,375	Dinas Kesehatan	Provinsi
Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	100%	801,840,000	100%	2,784,920,000	100%	1,045,187,000	100%	1,094,632,000	100%	1,111,026,400	100%	1,122,110,000	100%	1,122,110,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%	100%	-	100%	-	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	%	100%	-	100%	-	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	%	100%	-	100%	-	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5,884,526,528	100%	-	100%	3,011,000,000	100%	3,465,000,000	100%	3,377,000,000	100%	3,492,000,000	100%	3,492,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	-	1	-	1	75,000,000	1	165,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	98%	491,281,000	98%	-	98%	250,000,000	98%	275,000,000	98%	300,000,000	98%	350,000,000	98%	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	%	98%	-	98%	-	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	522,000,000	100%	534,000,000	100%	534,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	%	98%	-	98%	-	100%	1,000,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	98%	-	98%	-	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	98%	-	98%	-	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target															
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	98%	5,393,245,528	98%	-	100%	376,000,000	100%	415,000,000	100%	495,000,000	100%	498,000,000	100%	498,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	262,585,000	100%	-	100%	2,181,000,000	100%	2,439,000,000	100%	2,536,000,000	100%	2,875,000,000	100%	2,875,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	1	450,000,000	1	467,000,000	1	472,000,000	1	481,000,000	1	481,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%	100%	-	100%	-	100%	376,000,000	100%	386,000,000	100%	398,000,000	100%	399,000,000	100%	399,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	1	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi			
Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	90%	262,585,000	90%	-	90%	560,000,000	90%	760,000,000	90%	786,000,000	90%	850,000,000	90%	850,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	0	-	0	-	1	345,000,000	1	350,000,000	1	365,000,000	1	378,000,000	1	378,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	0	-	0	-	1	150,000,000	1	176,000,000	1	215,000,000	1	467,000,000	1	467,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	168,720,000	100%	2,767,500,000	100%	3,191,050,670	100%	3,789,030,000	100%	3,401,130,000	100%	4,179,700,300	100%	4,179,700,300	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Paket	0	-	1	180,000,000	1	46,000,000	1	98,000,000	1	128,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Paket	0	-	1	248,500,000	1	141,000,000	1	257,000,000	1	262,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	0	-	0	-	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor	Paket	0	-	1	222,000,000	1	201,000,000	1	268,000,000	1	299,000,000	1	402,000,000	1	402,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Paket	0	-	1	362,000,000	1	215,600,000	1	228,000,000	1	265,000,000	1	240,000,000	1	240,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	%	0	-	100%	180,000,000	100%	145,000,000	100%	240,000,000	100%	120,100,000	100%	130,200,000	100%	130,200,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Bahan/material	Ketersediaan Bahan material	Bulan	0	-	0	-	12	278,000,000	12	345,000,000	12	420,000,000	12	467,000,000	12	467,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	0	-	12	165,000,000	12	89,000,000	12	213,000,000	12	267,000,000	12	315,000,000	12	315,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	168,720,000	1	1,040,000,000	1	980,450,670	1	1,020,030,000	1	520,030,000	1	1,200,500,300	1	1,200,500,300	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	-	1	370,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	275,000,000	1	355,000,000	1	355,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	1	-	1	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	892,884,100	100%	3,341,420,000	100%	3,550,700,000	100%	4,406,600,000	100%	4,016,600,300	100%	4,016,600,300	Dinas Kesehatan	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target															
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paket	0	-	0	-	1	430,000,000	1	450,000,000	1	451,700,000	1	470,200,300	1	470,200,300	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	tersedianya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Paket	0	-	0	-	1	544,320,000	1	546,500,000	1	556,700,000	1	558,100,000	1	558,100,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Paket	0	-	1	316,504,700	1	350,100,000	1	375,200,000	1	880,200,000	1	392,300,000	1	392,300,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	0	-	1	346,379,400	1	567,000,000	1	689,000,000	1	692,000,000	1	698,000,000	1	698,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya	Persentase pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya	%	0	-	100%	230,000,000	100%	350,000,000	100%	375,000,000	100%	678,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	0	-	0	-	100%	450,000,000	100%	465,000,000	100%	498,000,000	100%	498,000,000	100%	498,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	0	-	0	-	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	3,565,650,000	100%	4,078,400,500	100%	4,569,600,800	100%	5,122,260,080	100%	5,745,400,900	100%	5,745,400,900	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	100%	-	100%		100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 bulan	-	12 bulan	310,640,000	12 bulan	253,200,000	12 bulan	274,300,000	12 bulan	297,200,000	12 bulan	300,000,000	12 bulan	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bulan	12 bulan	-	12 bulan	260,000,000	12 bulan	350,000,000	12 bulan	500,000,000	12 bulan	700,000,000	12 bulan	950,000,000	12 bulan	950,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12 bulan	-	12 bulan	2,995,010,000	12 bulan	3,200,200,500	12 bulan	3,520,300,800	12 bulan	3,850,060,080	12 bulan	4,220,400,900	12 bulan	4,220,400,900	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	-	100%	875,350,000	100%	6,083,652,384	100%	6,093,718,773	100%	7,397,557,002	100%	8,602,712,352	100%	8,602,712,352	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan	Bulan	0	-	12	670,350,000	12	246,900,000	12	267,400,000	12	278,200,000	12	301,800,000	12	301,800,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	Bulan	0	-	0	-	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		0		12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Bulan	0	-	12	205,000,000	12	375,000,000	12	500,000,000	12	578,000,000	12	675,000,000	12	675,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Bulan	0	-	0	-	12	550,000,000	12	600,000,000	12	650,000,000	12	670,000,000	12	670,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	0%	-	0%	-	100%	2,111,752,384	100%	1,926,318,773	100%	3,091,357,002	100%	4,155,912,352	100%	4,155,912,352	Dinas Kesehatan	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar																	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	0%	-	0%	-	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	128	46,987,085,048	125	56,391,585,747	124	39,445,233,177	123	23,475,303,109	122	26,034,943,612	121	29,273,191,763	121	29,273,191,763	Dinas Kesehatan	Provinsi		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	15		14		13		12		11		10		10		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16.30%		15.8%		15.3		14		13.3		12.8		12.8		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	2 Kab/Kota		2 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	90%		90%		92%		92%		93%		93%		93%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	60%		64%		68%		72%		76%		80%		80%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43%		43%		43%		57.14%		57.14%		67%		67%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Persentase Uia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92.90%		93.60%		94.10%		94.60%		95.00%		95.50%		95.50%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	57%		57%		71%		71%		71%		71%		71%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	87.88%		89%		90%		91%		92%		93%		93%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		2022				2023		2024		2025		2026				
			2021		2022		2023		2024		2025		2026						
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	95.50%		96%		97%		97%		97.50%		98%		98%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	90%		92%		94%		96%		96%		96%		96%		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	70%	12,879,479,133	73%	16,991,396,011	75%	17,572,830,477	80%	9,522,061,139	85%	7,022,061,139	90%	11,522,061,139	100%	11,522,061,139	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	Paket	1	214,800,000	1	8,000,000,000	1	6,700,000,000	1	4,000,000,000	1	500,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	Paket	0		0		1	3,000,000,000	1	300,000,000	1	500,000,000	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	0		0		1	1,000,000,000	1	300,000,000	1	500,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Paket	0		0		1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll	Kab/Kota	0		0		1	400,000,000	1	400,000,000	2	700,000,000	2	700,000,000	2	700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (regional maintenance center)	Persentase Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (regional maintenance center)	%	10%	-	30%		60%	500,000,000	70%	172,061,139	80%	172,061,139	85%	172,061,139	85%	172,061,139	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kegiatan	0		0		1	200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kegiatan	0		0		1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	1	10,034,501,866	1	4,500,000,000	1	1,122,830,477	1	800,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	%	65%	-	70%		70%	1,300,000,000	73%	400,000,000	75%	500,000,000	80%	500,000,000	80%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
	Persentase RSUD yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	%	65%	-	72%		73%		75%		77%		77%		77%		Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	0		0		1	300,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kegiatan	0		0		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Dasar		Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
			2021		2022		2023		2024		2025		2026					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan	0		0		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan	0		0		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan	1	2,630,177,267	1	4,491,396,011	1	750,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	93%	-	94%	-	95%	1,200,000,000	96%	1,200,000,000	97%	1,200,000,000	97%	1,200,000,000	97%	1,200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	80%	33,047,407,515	83%	38,307,385,947	86%	19,660,202,700	88%	12,062,795,970	90%	16,883,923,093	95%	16,062,352,463	95%	16,062,352,463	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	3,394,534,620	100%	168,500,000	100%	750,000,000	100%	500,000,000	100%	625,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) Provinsi	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100%	2,689,280,267	100%	2,156,505,278	100%	1,200,000,000	100%	500,000,000	100%	700,000,000	100%	700,000,000	100%	700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	91.0%	422,365,900	91.2%	1,290,000,000	91.3%	1,906,000,000	91.4%	950,000,000	91.5%	1,250,000,000	91.6%	1,250,000,000	91.6%	1,250,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNU)	%	90.8%	-	90.9%	-	91.0%		91.2%		91.3%		91.4%		91.4%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Kab/Kota	5 Kab/Kota	-	6 Kab/Kota	-	6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	70%		72%		74%	350,000,000	74%	150,000,000	75%	201,847,256	76%	50,000,000	76%	50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	Kab/Kota	3 Laporan	107,731,500	7 Kab/Kota	229,000,000	3 Laporan	125,000,000	3 Laporan	125,000,000	3 Laporan	130,000,000	3 Laporan	135,000,000	3 Laporan	135,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting (gizi kurang dan giz buruk) pada balita	%	11%	1,919,935,400	10.80%	8,337,179,000	10.60%	1,986,000,000	10.40%	856,000,000	10.20%	1,056,000,000	10%	1,086,000,000	10%	1,086,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
	Prevalensi stunting	%	16.30%		15.80%		15.30%		14%		13.30%		12.80%		12.80%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Bumil KEK	%	13.20%		12.40%		11.40%		10.40%		9.40%		8.40%		8.40%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	59%		60%		61%		62%		63%		64%		64%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Kabkota Melaksanakan surveilans gizi	%	74%		77%		80%		83%		86%		89%		89%		Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja	Kab/Kota	4 Kab/Kota	66,791,400	5 Kab/Kota	130,000,000	5 Kab/Kota	300,000,000	6 Kab/Kota	165,000,000	6 Kab/Kota	300,000,000	7 Kab/Kota	165,000,000	7 Kab/Kota	165,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan Olahraga	Kab/Kota	4 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		6 Kab/Kota		6 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		Dinas Kesehatan	Provinsi



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar				Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	%	30%	443,490,200	30%	310,946,000	35%	500,000,000	40%	250,000,000	45%	500,000,000	50%	500,000,000	50%	500,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	2 Kab/Kota		2 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase sarana air minum yang dawasi/dperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	50%		60%		68%		72%		76%		80%		80%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	44%		50%		56%		62%		65%		68%		68%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	60%		65%		70%		75%		78%		80%		80%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	%	23.44%		35.16%		39.06%		46.88%		54.69%		62.50%		62.50%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Fasyankes	30 Fasyankes		32 Fasyankes		35 Fasyankes		40 Fasyankes		45 Fasyankes		50 Fasyankes		50 Fasyankes		Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan	Kampanye	2 Kampanye	2,015,235,760	2 Kampanye	730,000,000	2 Kampanye	800,000,000	2 Kampanye	200,000,000	2 Kampanye	800,000,000	2 Kampanye	800,000,000	2 Kampanye	800,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar	Kab/Kota	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota			
	Jumlah Kegiatan promosi kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung	Kegiatan	12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	%	50%	112,998,900	55%	175,000,000	65%	500,000,000	67%	201,668,000	69%	741,927,120	69%	760,284,934	69%	760,284,934	Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional integrasi	RS	2 RS		2 RS		3 RS		3 RS		3 RS		4 RS		4 RS		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi	%	35%		40%		43%		43%		57%		57%		57%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota	Unit	1		1		1		1		2		2		2		Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB pada Bimil dan Pengobatan Hep C sesuai dengan therapy	%		2,085,504,515	75%	433,912,600	80%	3,290,000,000	85%	1,050,000,000	90%	3,390,000,000	95%	2,726,275,752	95%	2,726,275,752	Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase wanita usia 30 - 50 tahun. Yang dilakukan skrining kanker payudara dan kanker serviks	%	4%		5%		10%		15%		20%		25%		25%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Posbindu	%	45%		50%		55%		60%		65%		70%		70%		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Puskesmas yang melakukan Pelayanan Terpadu PTM	%	50%		55%		60%		65%		70%		75%		75%		Dinas Kesehatan	Provinsi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
			Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	5%		3 Kab/Kota		4 Kab/Kota		5 Kab/Kota		6 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase puskesmas yang mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok	%	30%		35%		40%		45%		50%		55%		55%			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Angka Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) sesuai target	%	35%		40%		43%		57%		71%		86%		86%			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis/ Success Rate (SR)	%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana Pneumonia sesuai Standar	%	52%		55%		90%		90%		90%		90%		90%			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Insidensi HIV Per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	%	0,05		0,05		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	65%		70%		75%		80%		85%		95%		95%			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Kab/Kota yang mencapai API Malaria < 1 /per 1,000 penduduk	%	57%		71%		71%		86%		86%		86%		86%			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94%		95%		95%		95%		95%		95%		95%			Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Kab/Kota dengan IR DED <49 per 100.000 penduduk	%	29%		42.86%		42.86%		57.14%		57.14%		71.43%		71.43%			Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	%	100%	11,730,000	100%	115,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	225,000,000	100%	225,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODG Berat yang mendapatkan layanan	%	30%		40%	20,000,000	50%	154,500,000	60%	159,135,000	70%	163,909,050	75%	168,826,322	75%	168,826,322	Dinas Kesehatan	Provinsi	
	Persentase penderita Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk usia ≥15 tahun yang mendapatkan layanan	%	20%		30%		40%		50%		60%		70%		70%			Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	Persentase Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	%	41%	90,730,000	47%	20,000,000	54%	217,102,700	61%	228,812,970	67%	241,694,267	74%	255,863,694	74%	255,863,694	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Laporan	1	717,500,000	1	1,800,000,000	1	500,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	87.88%	18,751,580,653	89%	22,291,343,069	90%	5,000,000,000	91%	5,000,000,000	92%	5,000,000,000	93%	5,000,000,000	93%	5,000,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
	Jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan daerah	orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang			Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan	Kab/Kota	7	148,416,700	7		7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	7	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pemenuhan pelaksanaan intervensi PIS PK di Puskesmas	%	25%	69,581,700	33%	100,000,000	48%	535,600,000	63%	300,000,000	70%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar																	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Persentase Kab/kota yang melaporkan SPM	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pembinaan pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pembinaan	%	68%	-	71%	-	74%	150,000,000	77%	100,000,000	80%	150,000,000	83%	100,000,000	83%	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Verifikasi dan penilaian kelayakan puskesmas untuk registrasi	Validasi dan Evaluasi terhadap registrasi puskesmas yang sesuai dengan standar	Kab/Kota	1	-	2	-	3	206,000,000	5	212,180,000	6	218,545,400	7	225,101,762	7	225,101,762	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Laporan	0		0		1	135,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Laporan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Laporan	0		0		1	135,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan	0		0		1	285,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Laporan	0		0		1	185,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	%	25%	188,611,200	37%	520,507,217	43%	1,203,000,000	57%	1,071,470,000	65%	1,079,614,100	71%	1,018,452,523	71%	1,018,452,523	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah Laporan Data Kesehatan	Laporan	7 Laporan	188,611,200	7 Laporan	520,507,217	7 Laporan	728,000,000	7 Laporan	771,470,000	7 Laporan	779,614,100	7 Laporan	818,452,523	7 Laporan	818,452,523	Dinas Kesehatan	Provinsi		
	Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan profil kesehatan tepat waktu	%	70%		75%		80%		85%		90%		90%		90%		Dinas Kesehatan	Provinsi		
	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi (kehumasan) melalui media online	Laporan	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan	0		0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Paket	0		0		1	375,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	90%	871,587,200	91%	572,296,572	92%	1,009,200,000	93%	818,976,000	94%	1,049,345,280	95%	670,325,638	95%	670,325,638	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengendalian dan Pegawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi	RS	2 RS	622,592,100	2 RS	470,000,000	2 RS	350,000,000	2 RS	350,000,000	2 RS	350,000,000	2 RS	350,000,000	2 RS	350,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pegawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas kesehatan	Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi RSUD	%	75%	248,995,100	80%	102,296,572	98%	659,200,000	98%	468,976,000	99%	699,345,280	99%	320,325,638	99%	320,325,638	Dinas Kesehatan	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target										2026					
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota	%	75%	-	80%		95%		96%		97%		98%		98%		Dinas Kesehatan	Provinsi		
	Jumlah pendampingan akreditasi klinik	Klinik	0	-	5		10		15		20		25		25		Dinas Kesehatan	Provinsi		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	50%	15,165,847,016	52%	14,915,874,162	54%	14,400,784,605	56%	13,718,329,474	58%	14,128,124,696	60%	14,527,685,241	60%	14,527,685,241	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan	1	14,865,706,716	1	13,961,748,324	1	13,400,000,000	1	13,450,000,000	1	13,600,000,000	1	13,700,000,000	1	13,700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan	%	72%	14,865,706,716	75%	13,961,748,324	78%	13,375,000,000	81%	13,425,000,000	83%	13,575,000,000	85%	13,675,000,000	85%	13,675,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya profil sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	1	-	1		1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000		25,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	80%	300,140,300	81%	954,125,838	82%	1,000,784,605	83%	268,329,474	84%	528,124,696	85%	827,685,241	85%	827,685,241	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Provinsi dengan sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang diterbitkan tahun berjalan	Sertifikat	90	-	90	680,000,000	90	500,000,000	90	100,000,000	90	125,000,000	90	300,000,000	90	300,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
	Laporan pelaksanaan Pendidikan/ Pelatihan/ Seminar pegawai	Laporan	1	-	1	-	1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk jabatan fungsional kesehatan	PAK	150	300,140,300	150	274,125,838	150	500,784,605	150	168,329,474	150	403,124,696	150	527,685,241	150	527,685,241	Dinas Kesehatan	Provinsi		
	Persentase pegawai dinas kesehatan dengan nilai SKP minimal Baik	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan	Provinsi		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	75.44%	-	86%	250,000,000	87%	250,000,000	88%	100,000,000	89%	150,000,000	90%	150,000,000	90%	150,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha	%	75	-	77	100,000,000	79	150,000,000	81	65,000,000	83	65,000,000	85	95,000,000	85	95,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase pengawasan sarana distribusi alat kesehatan dan farmasi cabang pasca penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK	%	80%		82%	100,000,000	84%	100,000,000	86%	40,000,000	88%	40,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Laporan	0		0		1	50,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	5%	-	10%	150,000,000	15%	100,000,000	20%	35,000,000	23%	85,000,000	25%	55,000,000	25%	55,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase pengawasan sarana UKOT pasca penerbitan Izin UKOT	%	5%		10%	150,000,000	15%	50,000,000	20%	20,000,000	23%	50,000,000	25%	35,000,000	25%	35,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Laporan	0		0		1	50,000,000	1	15,000,000	1	35,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	57%	3,139,059,900	71.43%	2,707,166,635	71.43%	916,238,550	85.71%	633,962,090	85.71%	1,207,877,061	100%	1,219,265,427	100%	1,219,265,427	Dinas Kesehatan	Provinsi
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	%	70	3,071,359,400	75	2,325,000,000	80	566,238,550	85	233,962,090	90	607,877,061	95	700,000,000	95	700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan	%	42%	3,071,359,400	57%	2,325,000,000	71%	566,238,550	71%	233,962,090	85%	607,877,061	100%	700,000,000	100%	700,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah Pelaksanaan Kampanye Kesehatan	Laporan	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Jumlah Posyandu yang menerapkan digitalisasi Posyandu	Posyandu	0		20		50		100		200		350		350		Dinas Kesehatan	Provinsi
	Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan Posyandu Aktif	%	14%		28%		42%		57%		71%		85%		85%		Dinas Kesehatan	Provinsi
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi	Kab/Kota	7	67,700,500	7	232,166,635	7	200,000,000	7	200,000,000	7	400,000,000	7	319,265,427	7	319,265,427	Dinas Kesehatan	Provinsi
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	100	67,700,500	100	232,166,635	100	200,000,000	100	200,000,000	100	400,000,000	100	319,265,427	100	319,265,427	Dinas Kesehatan	Provinsi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	%	60	-	65	150,000,000	70	150,000,000	75	200,000,000	80	200,000,000	85	200,000,000	85	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Laporan	0	-	0	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Dinas Kesehatan	Provinsi
Jumlah				88,299,024,058		108,677,982,865		103,091,466,886		89,574,726,246		97,000,986,661		104,767,778,658		104,767,778,658	Dinas Kesehatan	Provinsi

Tanjungpinang, 15 Desember 2021





**LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA  
RSUD RAJA AHMAD TABIB**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021**  
**RSUD RAJA AHMAD TABIB**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
			2021	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				25,713,477,116		41,147,543,200		23,227,860,431		16,973,863,297		17,965,420,580		22,237,100,484	-	22,237,100,484	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Tingkat	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		International		International		International		RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
	Rumah Sakit Pendidikan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Tingkat	-		Satelit		Satelit		Utama		Utama		Utama				RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	78.50%		78.50%		79%		80%		80%		80%		80%		RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		12,419,897,110	80%	34,761,691,200	81%	15,960,760,431	82%	9,296,863,297	83%	10,320,250,000	84%	13,701,300,484	84%	13,701,300,484	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Gedung		155,327,500	1 Gedung	24,841,663,200	1 Gedung	8,430,760,431	1 Gedung	500,000,000	0	0	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan Rumah Sakit Pendidikan	Fakultas Kedokteran		840,000,000	1 Fakultas Kedokteran	800,000,000	2 Fakultas Kedokteran	800,000,000	2 Fakultas Kedokteran	850,000,000	3 Fakultas Kedokteran	850,000,000	3 Fakultas Kedokteran	1,000,000,000	3 Fakultas Kedokteran	1,000,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	%	1	142,569,610	100%	2,000,000,000	100%	1,800,000,000	100%	1,500,000,000	100%	2,200,000,000	100%	2,960,000,000		2,960,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tahun	1 Tahun	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan	Paket	100%	5,000,000,000	0	-	1	200,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase ketersediaan Pengadaan alat kesehatan / Alat Penunjang Medik di RSUD RAT	%	50 Persen	1,581,000,000	55 Persen	3,500,000,000	60 Persen	800,000,000	65 Persen	1,000,200,000	70 Persen	1,000,250,000	75 Persen	1,600,300,000	75 Persen	1,600,300,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase alat kesehatan yang telah dikalibrasi pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	100%	1,000,000,000	100%	935,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Seprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah kegiatan pengadaan Bahan Habis Pakai BHP Non Medis pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Paket	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	400,000,000	1 Paket	450,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Barang Penunjang Operasional RS	Jumlah Pengadaan Pendukung Penunjang Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik non medik pada RSUD Raja Ahmad Tabib dan	Paket			1	-	1	300,000,000	1	300,000,000	1 Paket	400,000,000	1 Paket	450,000,000	1 Paket	450,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan	0	0	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	1,370,000,000	1 Kegiatan	2,390,000,000	1 Kegiatan	2,585,000,000	1 Kegiatan	4,276,000,484	1 Kegiatan	4,276,000,484	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
	Persentase alat kesehatan yang telah dikalibrasi pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	0	-	0	-	100%		100%		100%		100%		100%	-	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan telemedicine di RSUD Raja Ahmad Tabib	Laporan	0	-	1	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	25,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		2022		2023		2024		2025		2026		Renstra SKPD 2026					
			2021																	
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pengadaan Obat, Vaksin, makan dan minum pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Paket	3 Paket	1,701,000,000	3 Paket	1,785,000,000	3 Paket	1,800,000,000	3 Paket	2,146,663,297	3 Paket	2,460,000,000	3 Paket	2,500,000,000	3 Paket	2,500,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Kegiatan	1	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	1	13,128,580,006	1	6,198,840,000	1	6,217,100,000	1	6,527,000,000	1	6,608,500,000	1	6,765,600,000	1	6,765,600,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Tersedianya Pendukung Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	Kegiatan	1 Kegiatan	12,878,580,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah kegiatan dan pengembangan pelayanan kesehatan Ibu dan anak pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Kegiatan	-	-	1	0	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah pengelolaan pengembangan pelayanan kesehatan lingkungan	Kegiatan	-	-	1	1,501,840,000	1	1,202,100,000	1	1,502,000,000	1	1,503,000,000	1	1,600,000,000	1	1,600,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Kegiatan	12 Kegiatan	250,000,000	12 Kegiatan	0	12 Kegiatan	200,000,000	12 Kegiatan	170,000,000	12 Kegiatan	250,000,000	12 Kegiatan	300,000,000	12 Kegiatan	300,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah kegiatan dan pengembangan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan Jiwa (ODMK) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Kegiatan					1 Kegiatan	65,000,000	1 Kegiatan	65,000,000	1 Kegiatan	65,500,000	1 Kegiatan	65,600,000	1 Kegiatan	65,600,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase kegiatan Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan dalam 1 tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Persen			100 Persen	4,697,000,000	100 Persen	4,700,000,000	100 Persen	4,750,000,000	100 Persen	4,750,000,000	100 Persen	4,750,000,000	100 Persen	4,750,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Peranganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya Penanganan Gawat Darurat 119 yang Terintegrasi dan Berstandar Internasional	Layanan					1	10,000,000						0	-	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen penyusunan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dokumen	1	165,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	620,000,000	1 Dokumen	620,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen terkait pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan dukungan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Dokumen	1 Dokumen	115,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah kegiatan penyediaan pendukung alat /perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	87,012,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	616,670,580	1 Dokumen	1,150,200,000	1 Dokumen	1,150,200,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perinciran Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pelaksanaan Rumah Sakit Rujukan	Dokumen	0	-	1 Dokumen	87,012,000	1 Laporan	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,200,000	1 Dokumen	50,200,000	1 Dokumen	50,200,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		2022		2023		2024		2025		2026		2026					
			2021																	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Dokumen pelaksanaan dan pengelolaan RS pendidikan dan akreditasi pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	266,470,580	1 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	800,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	78.5%	0	78.5%	0	79%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti Diklat>20 Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	85.70%	12,882,799,997	65%	5,282,406,854	70%	5,620,963,069	75%	4,098,129,613	80%	4,343,872,974	85%	4,944,133,477	85%	4,944,133,477	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan	1	12,582,799,997	1	4,814,406,854	1	4,420,963,069	1	3,248,129,613	1	3,493,872,974	1	4,144,133,477	1	4,144,133,477	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Penghasilan Pegawai Non ASN Setiap Tahunnya	Bulan	12 Bulan	12,582,799,997	12 Bulan	4,814,406,854	12 Bulan	4,420,963,069	12 Bulan	3,248,129,613	12 Bulan	3,493,872,974	12 Bulan	4,144,133,477	12 Bulan	4,144,133,477	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	1	300,000,000	1	468,000,000	1	1,200,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase jumlah pegawai yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	60%	200,000,000	65%	285,260,000	70%	1,000,000,000	75%	700,000,000	80%	700,000,000	85%	700,000,000	85%	700,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pegawai RSUD RAT dengan nilai SKP minimal Baik	%	100%	100,000,000	100%	182,740,000	100%	200,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100%	191,339,013,913	100%	80,828,744,565	100%	91,691,991,940	100%	98,360,788,958	100%	105,514,919,293	100%	113,189,727,067	100%	113,189,727,067	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	%	100%	115,000,000	100%	-	100%	2,750,760	100%	2,950,824	100%	3,165,448	100%	3,395,692	100%	3,395,692	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	1	1,833,840	1	1,967,216	0	2,110,298	0	2,263,795	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	40,000,000	0	0	1 Laporan	916,920	1 Laporan	983,608	1 laporan	1,055,149	1 laporan	1,131,897	1 laporan	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Asistensi, Advokasi dan Implementasi Perencanaan Pembangunan	Kegiatan	100%	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	61,732,105,562	100%	32,811,492,065	100%	37,029,359,007	100%	39,722,519,813	100%	42,611,680,087	100%	45,711,113,379	100%	45,711,113,379	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12 bulan	60,403,060,562	12 bulan	31,978,552,065	12 bulan	36,084,232,345	12 Bulan	38,708,653,693	12 Bulan	41,524,071,875	12 bulan	44,544,396,126	12 bulan	44,544,396,126	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		2022		2023		2024		2025		2026		Renstra SKPD 2026					
			2021																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12 bulan	1,169,098,000	1 tahun	825,440,000	1 Tahun	939,625,142	1 tahun	1,007,964,473	1 tahun	1,081,277,317	1 tahun	1,159,925,869	1 tahun	1,159,925,869	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi yang dikoordinasikan dengan pihak pihak terkait	Laporan	1 Laporan	99,947,000	1 laporan		1 laporan	916,920	1 laporan	983,608	1 laporan	1,055,149	1 laporan	1,131,897	1 laporan	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Terkait Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal	Dokumen	0	0	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	2,750,760	1 dokumen	2,950,824	1 dokumen	3,165,448	1 dokumen	3,395,692	1 dokumen	3,395,692	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester RSUD RAT Hasil Koordinasi dengan Pihak Terkait	Laporan	1 Laporan	35,000,000	1 laporan	0	1 laporan	916,920	1 laporan	983,608	1 laporan	1,055,149	1 dokumen	1,131,897	1 dokumen	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	0	1 tahun	25,000,000	0	0	0	916,920	0	983,608	0	1,055,149	0	1,131,897	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	-	100%	-	100%	91,691,992	100%	98,360,789	100%	105,514,919	100%	113,189,727	100%	113,189,727	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah RS	Bulan	0	0	12	0	12	91,691,992	12	98,360,789	1 laporan	105,514,919	12	113,189,727			RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	1	2,750,760	1	2,950,824	1	3,165,448	1	3,395,692	1	3,395,692	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan RSUD RAT	Laporan	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	1,833,840	1 laporan	1,967,216	1 laporan	2,110,298	1 laporan	2,263,795	1 laporan	2,263,795	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Pendapatan RS serta Dokumen Kebijakan Terkait Pendapatan RS	Laporan	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	916,920	1 laporan	983,608	1 laporan	1,055,149	1 laporan	1,131,897	1 laporan	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	100%	31,336,000	100%	176,876,453	100%	189,740,752	100%	203,541,272	100%	218,346,194	100%	218,346,194	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan pendukung administrasi Pegawai RS RAT	Paket	0	0	Paket	0	Paket	9,169,199	Paket	9,836,079	Paket	10,551,492	Paket	11,318,973	Paket	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	0	0	1	113,698,070	1	121,967,378	1	130,838,500	1	140,355,262	1	140,355,262	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan pendataan dan Pengolahan Pengadministrasian Kepegawaian RS	Laporan	0	-	1	-	1	9,169,199	1	9,836,079	1	10,551,492	1	11,318,973	1	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	65%	-	70%	31,336,000	75%	35,670,786	75%	38,265,137	80%	41,048,297	85%	44,034,015	1	44,034,015	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	0	0	1	0	1	9,169,199	1	9,836,079	1	10,551,492	1	11,318,973	1	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	755,000,000	100%	1,057,424,000	100%	1,089,630,256	100%	1,168,879,521	100%	1,253,896,290	100%	1,345,100,577	100%	1,345,100,577	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD RAT	Paket	0	-	1	37,500,000	1	42,687,467	1	45,792,144	1	49,122,770	1	52,695,799	1	52,695,799	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor pada RSUD RAT	Paket	1	50,000,000	1	200,000,000	1	113,698,070	1	121,967,378	1	130,838,500	1	140,355,262	1	140,355,262	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar 2021		2022		2023		2024		2025		2026							
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga pada RSUD RAT	Paket	0	-	1	50,000,000	1	56,916,623	1	61,056,193	1	65,497,027	1	70,261,065	1	70,261,065	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor pada RSUD RAT	Bulan	1 tahun	450,000,000	1 Tahun	300,000,000	12	341,499,737	12	366,337,156	12	392,982,161	12	421,566,390	12	421,566,390	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada RSUD RAT	Kegiatan	1	-	1	75,000,000	1	84,356,633	1	90,491,926	1	97,073,726	1 tahun	104,134,549	1 tahun	104,134,549	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada RSUD RAT	Bulan	12	35,000,000	0	0	12	916,920	12	983,608	12	1,055,149	12	1,131,897	12	1,131,897	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Kunjungan Tamu pada RSUD RAT	Bulan	12	20,000,000	12	25,000,000	12	28,458,311	12	30,528,096	12	32,748,513	12	35,130,532	12	35,130,532	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi Terkait pada RSUD RAT	Laporan	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	369,924,000	1 Tahun	421,096,495	1 laporan	451,723,020	1 laporan	484,578,443	1 laporan	519,825,084	1 laporan	519,825,084	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	5,120,000,000	-	100%	320,921,972	100%	344,262,761	100%	369,302,218	100%	396,164,045	100%	396,164,045	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paket	0	-	0	-	0	0	1	196,721,578	1	-	1	226,379,454	1	226,379,454	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paket			0	-	1	183,383,984	1	0	1	211,029,839	1	0	1	-	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Paket	0	-	1 Unit		1 unit	9,169,199	1 unit	9,836,079	1 unit	10,551,492		11,318,973	-	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Mebel	Jumlah kegiatan Pengadaan Mebel pada RSUD RAT	Paket	0	-	1	-	1	9,169,199	1	9,836,079	1	10,551,492	1	11,318,973	1	11,318,973	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan (VideoTron,SolarPanel/SolarCell dan Dashboard Informasi)yang terlaksana dibagi jumlah pengadaan	Paket	0	5,050,000,000	0	0	0	27,507,598	0	29,508,237	0	31,654,476	0	33,956,918	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Paket	0	70,000,000	0	0	0	91,691,992	0	98,360,789	0	105,514,919	0	113,189,727	0	0	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	9,598,000,000	100%	9,249,215,600	100%	10,519,099,030	100%	11,284,157,512	100%	12,104,894,459	100%	12,985,364,621	100%	12,985,364,621	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Jasa Pengiriman pada RSUD RAT	Bulan	12	20,000,000	12	25,000,000	12	28,458,311	12	30,528,096	12	32,748,513	12	35,130,532	12	35,130,532	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Listrik, Air, Telpom, Internet dan TV Kabel	Bulan	12	6,828,000,000	12	3,437,223,100	12	3,912,702,613	12	4,197,275,114	12	4,502,557,875	12	4,830,059,108	12	4,830,059,108	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Sewa Mesin Fotocopy dan Mesin Lainnya, Jasa Sewa Rumah Dinas, dan Jasa Sewa Gudang	Bulan	0	0	12	35,000,000	12	30,258,357	12	32,459,060	12	34,819,923	12	37,352,610	12	37,352,610	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan jasa kemanana pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Bulan	5	2,750,000,000	12	5,751,992,500	12	6,547,679,748	12	7,023,895,242	12	7,534,768,147	12	8,082,822,370	12	8,082,822,370	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	4,473,000,000	100%	179,276,900	100%	280,595,419	100%	301,003,241	100%	322,896,278	100%	346,382,690	100%	346,382,690	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (2 Direktur, 3 Wadir, 4 Pejabat Eselon Lainnya dan 1 Ketua Komite Medik)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Lapangan (2 Pick Up, 5 Ambulance, 2 Mobil Jenazah, 7 Motor Operasional)	Bulan	12	300,000,000	12	29,276,900	12	33,326,845	12	35,750,721	12	38,350,998	12	41,140,523	12	41,140,523	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan (2 Pick Up, 5 Ambulance, 2 Mobil Jenazah, 7 Motor Operasional)	Bulan	12	-	12	150,000,000	12	170,749,868	12	183,168,578	12	196,491,081	12	210,783,195	12	210,783,195	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	TerTersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan Rumah Sakit Tersedianya retribusi dan iuran	Kegiatan /Bulan	12	4,173,000,000	-	-	-	76,518,705	-	82,083,942	-	88,054,199	-	94,458,972	-	94,458,972	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien RSUD Raja Ahmad Tabib	Kunjungan	60,000	109,545,908,351	61,000	37,500,000,000	62,000	42,178,316,292	63,000	45,245,962,921	64,000	48,536,862,875	65,000	52,067,274,451	65,000	52,067,274,451	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien dalam 1 tahun RSUD Raja Ahmad Tabib	Kunjungan	60,000	109,545,908,351	61,000	37,500,000,000	62,000	42,178,316,292	63,000	45,245,962,921	64,000	48,536,862,875	65,000	52,067,274,451	65,000	52,067,274,451	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi
JUMLAH				229,935,291,026		127,258,694,619		120,540,815,440		119,432,781,868		127,824,212,847		140,370,961,028		140,370,961,028	RSUD Raja Ahmad Tabib	Provinsi

Tanjungpinang, 15 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MOS. BISRI, SKM, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19710109 199501 1 001



**LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA  
RSUD ENGKU HAJI DAUD**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026**  
**RSUD ENGKU HAJI DAUD**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungja wab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100%	56,120,790,348	100%	51,957,035,324	100%	60,738,418,632	100%	65,175,187,978	100%	69,936,292,365	100%	75,045,459,236	100%	75,045,459,236	RSUD EHD	Provinsi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	%	100%	69,614,600	100%	120,105,100	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	59,676,500	6	95,105,100	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	9,938,100	1	25,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	36,850,242,594	100%	30,567,131,105	100%	37,088,418,632	100%	39,670,187,978	100%	43,496,292,365	100%	46,845,459,236	100%	46,845,459,236	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Setiap Tahunnya	%	100%	36,322,347,594	100%	29,986,335,105	100%	36,358,418,632	100%	38,820,187,978	100%	42,546,292,365	100%	45,795,459,236	100%	45,795,459,236	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Administrasi Pelaksana Tugas Kegiatan Setiap Tahunnya	%	100%	492,396,000	100%	530,796,000	100%	630,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	35,499,000	2	50,000,000	2	100,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	%	100%	10,648,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Persentase Kecukupan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sesuai Dengan Jumlah Pegawai	%	100%	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	-	100%	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawalan (SIMPEG) yang Memadai per Tahun	Dokumen	1	10,648,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	403,903,930	100%	645,000,000	100%	820,000,000	100%	1,015,000,000	100%	1,140,000,000	100%	1,290,000,000	100%	1,290,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	%	100%	199,533,930	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya Kebutuhan ATK dan Perlengkapan Kantor Lainnya	%	100%	40,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercukupinya Dokumen Pasien per Tahunnya	%	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tercukupinya Kebutuhan Koran RS Setiap Tahunnya	%	100%	-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	75,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu dan Rapat	%	100%	49,420,000	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	RSUD EHD	Provinsi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungja wab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					2021		2022		2023		2024		2025					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam dan Luar Daerah)	%	100%	64,950,000	100%	125,000,000	100%	200,000,000	100%	300,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	-	1	-	1	-	1	400,000,000	1	-	1	800,000,000	1	800,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	-	1	-	1	-	1	400,000,000	1	-	1	800,000,000	1	800,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	1,199,596,500	100%	1,100,605,000	100%	1,400,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,600,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telpn, Internet, Air Bersih dan Listrik RS	%	100%	1,199,596,500	100%	1,100,605,000	100%	1,400,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,600,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	1,065,907,395	100%	1,773,134,200	100%	3,030,000,000	100%	3,890,000,000	100%	4,000,000,000	100%	4,010,000,000	100%	4,010,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan aktif (hidup)	%	100%	-	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%	140,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100%	115,983,595	100%	73,685,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Perizinan Sarana dan Prasarana RS	%	100%	-	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pemeliharaan Mebel	Tercukupinya Anggaran Untuk Perbaikan Mebel RS Setiap Tahunnya	%	100%	99,870,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kesehatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100%	453,497,400	100%	200,065,400	100%	300,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya gedung/bangunan RS dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100%	296,647,400	100%	200,000,000	100%	300,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pemeliharaan Aset Tak Bervujud	Tersedianya Soft Ware SIMRS dan Internet RS dalam kondisi baik	%	100%	99,909,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa kebersihan lingkungan RS	%	100%	-	100%	339,691,900	100%	1,300,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan dalam kondisi baik dan layak pakai	%	100%	-	100%	339,691,900	100%	200,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Dokumen	1	16,520,877,329	1	17,501,059,919	1	18,000,000,000	1	18,500,000,000	1	19,500,000,000	1	20,000,000,000	1	20,000,000,000	RSUD EHD	Provinsi



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungja wab	Lokasi	
			Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
					2021					2022		2023		2024		2025			2026
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Dokumen	1	16,520,877,329	1	17,501,059,919	1	18,000,000,000	1	18,500,000,000	1	19,500,000,000	1	20,000,000,000	1	20,000,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Paripurna	Paripurna	10,031,345,936	Paripurna	19,357,320,701	Paripurna	16,479,694,679	Paripurna	9,172,378,823	Paripurna	13,642,207,692	Paripurna	15,180,661,705	Paripurna	15,180,661,705	RSUD EHD	Provinsi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	%	80%		81%		82%		83%		84%		84%		84%		RSUD EHD	Provinsi	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100%	7,858,001,000	100%	11,007,320,701	100%	13,159,694,679	100%	6,352,378,823	100%	10,842,207,692	100%	12,580,661,705	100%	12,580,661,705	RSUD EHD	Provinsi	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	70%	1,732,171,400	75%	1,507,320,701	80%	3,000,000,000	85%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	90%	1,000,000,000	90%	1,000,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	70%	224,077,000	75%	1,000,000,000	80%	1,500,000,000	85%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	90%	1,500,000,000	90%	1,500,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	70%	765,520,000	75%	1,000,000,000	80%	1,500,000,000	85%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	90%	1,500,000,000	90%	1,500,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakainya)	Jumlah Persentase Kesesuaian Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dengan Standar RS Type C (sesuai data di ASPAK)	%	70%	1,936,232,600	75%	1,500,000,000	80%	2,000,000,000	85%	1,500,000,000	85%	1,500,000,000	90%	2,500,000,000	90%	2,500,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman RSUD EHD	Paket	10%	3,200,000,000	8%	6,000,000,000	3	5,159,694,679	4%	1,852,378,823	2%	6,342,207,692	2%	6,080,661,705	2%	6,080,661,705	RSUD EHD	Provinsi	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	%	80%	2,173,344,936	81%	6,050,000,000	82%	2,320,000,000	83%	2,020,000,000	84%	2,200,000,000	85%	1,800,000,000	85%	1,800,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	%	80%	111,163,000	81%	350,000,000	82%	500,000,000	83%	600,000,000	84%	200,000,000	85%	300,000,000	85%	300,000,000	RSUD EHD	Provinsi	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	%	80%	435,742,500	81%	700,000,000	82%	820,000,000	83%	920,000,000	84%	500,000,000	85%	500,000,000	85%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun Dasar		Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Persentase Kematian Pasien Yang Dirawat Dengan Kasus COVID-19 per Tahun	%	10%	1,626,439,436	8%	5,000,000,000	6%	1,000,000,000	4%	500,000,000	2%	1,500,000,000	2%	1,000,000,000	2%	1,000,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan SIMRS Dibagi Total Jumlah Unit Kerja Dikali 100	%	45%	-	60%	2,000,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan SIMRS Dibagi Total Jumlah Unit Kerja Dikali 100	%	45%	-	60%	2,000,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Status Akreditasi RSUD EHD Yang Diterbitkan KARS Tahun Dimaksud	Paripurna	1	-	Paripurna	300,000,000	Paripurna	600,000,000	Paripurna	300,000,000	Paripurna	300,000,000	Paripurna	500,000,000	Paripurna	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Status Akreditasi RSUD EHD Yang Diterbitkan KARS Tahun Dimaksud	Paripurna	1	-	Paripurna	300,000,000	Paripurna	600,000,000	Paripurna	300,000,000	Paripurna	300,000,000	Paripurna	500,000,000	Paripurna	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	25%	11,761,015,938	30%	11,250,179,590	35%	10,581,982,994	40%	7,773,811,872	50%	7,674,495,819	60%	8,235,000,292	60%	8,235,000,292	RSUD EHD	Provinsi
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan	1	11,749,015,938	1	10,450,179,590	1	9,731,982,994	1	6,923,811,872	1	6,824,495,819	1	7,385,000,292	1	7,385,000,292	RSUD EHD	Provinsi
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM RSUD EHD	%	100%	11,749,015,938	100%	10,450,179,590	100%	9,731,982,994	100%	6,923,811,872	100%	6,824,495,819	100%	7,385,000,292	100%	7,385,000,292	RSUD EHD	Provinsi
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	1	12,000,000	1	800,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	25%	12,000,000	30%	500,000,000	35%	500,000,000	40%	500,000,000	50%	500,000,000	60%	500,000,000	60%	500,000,000	RSUD EHD	Provinsi
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pegawai Unit Pelayanan Yang Sudah Dilakukan Kredensial	%	100%	-	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	RSUD EHD	Provinsi
JUMLAH				77,913,152,222		82,564,535,615		87,800,096,305		82,121,378,673		91,252,995,875		98,461,121,233		98,461,121,233	RSUD EHD	Provinsi

Tanjungpinang, 15 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
MOH. BESRI, SKM, M.Kes  
Gembira Utama Muda / IV.c  
NIP. 19710109 199501 1 001



## **DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA**

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2021-2026**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor"</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah pelayanan administrasi kantor dengan nilai kelancaran baik/jumlah pelayanan admistrasi kantor x 100%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen perangkat daerah dikali 100 persen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	Jumlah dokumen renstra yang tersusun dibagi dengan jumlah dokumen renstra dikali 100 persen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	%	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun dibagi dengan jumlah Dokumen RKA SKPD dikali 100 persen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%	Jumlah Dokumen RKA SKPD Perubahan yang tersusun dibagi dengan jumlah Dokumen RKA SKPD perubahan dikali 100 persen

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	%	Jumlah Dokumen RKA SKPD Perubahan yang tersusun dibagi dengan jumlah Dokumen RKA SKPD perubahan dikali 100 persen
	Persentase Satker Provinsi/Kabupaten /Kota yang mengusulkan kegiatan DAK	%	Jumlah Satker Provinsi /Kabupaten /Kota yang mengusulkan kegiatan DAK dibagi dengan jumlah Satker Provinsi/Kabupaten/ Kota dikali 100 persen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen DPA-Perubahan SKPD	%	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang dihasilkan dibagi dengan jumlah dokumen DPA SKPD dikali 100 persen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dibagi dengan jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dikali 100 persen
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan melalui survei kepuasan masyarakat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun dibagi dengan jumlah dokumen laporan kinerja dikali 100 persen

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda/Rakorpim yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda/Rakorpim yang disusun
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi Jumlah Kebutuhan bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dikali 100 persen</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan	%	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN dibagi dengan 12 Bulan dikali 100 persen
Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	Jumlah Bulan Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dibagi dengan 12 Bulan dikali 100 persen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun / jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD x 100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	%	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun/ jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun/ jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD x 100%
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%	Jumlah bahan tanggapan yang diselesaikan/ jumlah bahan tanggapan yang masuk tahun berjalan x 100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Hasil Koordinasi dengan Pihak Terkait / jumlah kebutuhan pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester x 100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	%	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran/ jumlah kebutuhan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran x 100%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun / jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah x 100%</b>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	jumlah laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun/ jumlah laporan pengamanan barang milik daerah x 100%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	%	Jumlah laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD/ jumlah kebutuhan laporan laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD x 100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	%	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun/ laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD x 100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun / Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD x 100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun/ jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	Jumlah laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang disusun/ jumlah laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah x 100%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Jumlah kebutuhan dikali 100 persen
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%	Jumlah Laporan/Dokumen Pendataan dan Pengolahan Pengadministrasian Kepegawaian yang disusun/ jumlah Jumlah Laporan/Dokumen Pendataan dan Pengolahan Pengadministrasian Kepegawaian x 100%
Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	Jumlah Pegawai yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tahun berjalan/ jumlah pegawai x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Jumlah kebutuhan dikali 100 persen</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor	Paket	Jumlah Paket Bahan logistik kantor

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Paket	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	%	Jumlah bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan / jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanganx 100%
Penyediaan Bahan/material	Ketersediaan Bahan material	Bulan	jumlah bulan yang tersedia bahan material
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis	Laporan	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis yang disusun
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi</b>
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paket	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi tahun berjalan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	tersedianya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Paket	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan tahun berjalan
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Paket	Jumlah Pengadaan Mebel tahun berjalan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya tahun berjalan
Pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya	Persentase pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya	%	Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dilaksanakan / jumlah kebutuhan penngadaan gedung kantor dan bangunan lainnya x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia/ Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang dibutuhkan x 100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang tersedia x Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang dibutuhkan x 100%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan daerah yang disusun/Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan daerah yang disusun x 100%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat yang tersedia / Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat x 100%
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Jumlah Bulan dengan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bulan	Jumlah Bulan dengan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun/ jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%</b>
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan	Bulan	Jumlah bulan dengan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan yang disediakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	Jumlah bulan dengan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan
Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Bulan	Jumlah bulan dengan jasa Pemeliharaan Mebel yang disediakan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Bulan	Jumlah bulan dengan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan yang disediakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Bulan	Jumlah bulan dengan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dilaksanakan / Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dibutuhkan x 100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan x Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibutuhkan x 100%
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	<b>per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	<b>Jumlah kematian ibu berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu / Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama x 100.000</b>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	Jumlah bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun / jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama x 1.000
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	(Jumlah balita dengan TB per umur < - 2 SD : Jumlah balita) x 100
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama x 100%
	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap dibagi semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan x 100%
	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	Jumlah ODHA yang mengakses ARV / Jumlah ODHA yang memenuhi syarat pengobatan x 100%
	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	Jumlah Kabupaten/Kota yang tersertifikasi Eliminasi malaria/jumlah kab/kota x 100%
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap : jumlah balita usia 0-11 bln x 100%
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas/ Jumlah Seluruh Kab/Kota x100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	Jumlah penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS dibagi Jumlah penduduk dikali 100%
	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	Jumlah Puskesmas Terakreditasi / Jumlah Seluruh Puskesmas yang Terregister x 100%
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi/ Jumlah Seluruh Rumah Sakit x 100%
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial > 80% / Jumlah Puskesmas x 100%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / Jumlah Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provins x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	Paket	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya yang dilaksanakan tahun berjalan
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	Paket	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit yang dilaksanakan tahun berjalan
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dilaksanakan tahun berjalan
Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Paket	Jumlah Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan tahun berjalan
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (regional maintenance center)	Persentase Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (regional maintenance center)	%	Tahapan pengembangan RMC Provinsi/5 Tahapan x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kegiatan	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dilaksanakan tahun berjalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan gedung tahun berjalan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun dimaksud
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	%	Jumlah puskesmas yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar/ jumlah puskesmas x 100
	Persentase RSUD yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	%	Jumlah RS yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar/ jumlah RS x 100
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	Jumlah Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan tahun berjalan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi tahun berjalan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan tahun berjalan
Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kegiatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan tahun berjalan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan	Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disusun
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial > 80% / Jumlah Puskesmas yang melapor x 100
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi / jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi x 100%</b>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama x 100%
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien dan tenaga pendukung dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	Jumlah Ibu Bersalin di wilayah kerja puskesmas yang mendapatkan pertolongan sesuai standard oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun/ jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun yang sama x 100%
	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3)	%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke tiga-hariketujuh dan 1 kali pada hari ke 8-hari ke 28 setelah lahir / jumlah seluruh bayi usia 0 - 28 hari di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia / jumlah seluruh kabupaten/kota x 100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	%	Jumlah balita dengan BB per TB < -2 SD : Jumlah balita) x 100
	Prevalensi stunting	%	Jumlah balita dengan TB per umur < -2 SD : Jumlah balita) x 100
	Persentase Bumil KEK	%	jumlah ibu hamil risiko KEK / Jumlah ibu Hamil yang diukur LILA x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	jumlah bayi kurang dari 6 Bulan yang mendapatkan asi eksklusif / jumlah bayi usia <6 bulan x 100%
	Persentase Kabkota Melaksanakan surveilans gizi	%	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan surveilans gizi / Jumlah Kabupaten/Kota x 100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja	Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan Olahraga	Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	%	Jumlah desa/kelurahan yang sudah terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)
	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang dilakukan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun dengan jumlah SAM yang ada di kali 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	Jumlah TPP yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibanding jumlah TPP dikali 100%.
	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	Jumlah TFU (Sekolah, Pasar, Puskesmas) yang dilakukan pengawasan sesuai standar di wilayah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah seluruh TFU (Sekolah, Pasar, Puskesmas) yang terdaftar dikali 100 %.
	Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	%	Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang telah melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar/ Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) x 100%
	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Fasyankes	Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang telah melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar/ Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) x 100%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan	Kampanye	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan tahun dimaksud
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar	Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Jumlah Kegiatan promosi kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan promosi kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	%	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan kesehatan tradisional/jumlah puskesmas x 100%
	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional integrasi	RS	Jumlah kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi / Jumlah Kab/Kota x 100
	Persentase kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi	%	Jumlah kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi / Jumlah Kab/Kota x 100
	Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota	Unit	Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB pada Bumil dan Pengobatan Hep C sesuai dengan therapy	%	Jumlah Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB pada Bumil dan Pengobatan Hep C sesuai dengan therapy x jumlah kab/kota x 100%
	Persentase wanita usia 30 - 50 tahun. Yang dilakukan skrining kanker payudara dan kanker serviks	%	Jumlah wanita usia 30 - 50 tahun yang dilakukan skrining kanker payudara dan kanker serviks / jumlah wanita usia 30-50 tahun x 100%
	Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Posbindu	%	jumlah desa/kelurahan dengan posbindu/ jumlah seluruh desa/kelurahan x 100%
	Puskesmas yang melakukan Pelayanan Terpadu PTM	%	jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan terpadu PTM/jumlah puskesmas x 100%
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
	Persentase puskesmas yang mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok	%	Jumlah puskesmas yang mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok/jumlah puskesmas x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Angka Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage) sesuai target	%	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai Angka Cakupan Penemuan Pengobatan (Treatment Coverage) sesuai target dibagi 7 kab/kota dikali 100
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis/ Success Rate (SR)	%	Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap dibagi semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan x 100%
	Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana Pneumonia sesuai Standar	%	Jumlah Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana Pneumonia sesuai Standar/ Jumlah Kab/Kota x 100
	Insidensi HIV Per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	per 1000 penduduk	Jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur > 15 tahun pada periode tertentu x jumlah penduduk x 1000
	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	Jumlah ODHA baru yang memulai ARV / Jumlah ODHA baru ditemukan x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Persentase Kab/Kota yang mencapai API Malaria < 1 /per 1,000 penduduk	%	Jumlah Kab/Kota Dengan API Malaria < 1 per 1,000 penduduk/ Jumlah Kab/Kota x 100%
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	Jumlah Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dibagi dengan jumlah survivant infant (SI) dikali 100%
	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk	%	Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk/Jumlah Kab/Kota x 100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	%	Jumlah hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang di entry dalam SISKOHATKES pada tiga bulan sebelum operasional dibagi dengan jumlah kuota jemaah haji pada tahun berjalan dikalikan 100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan layanan	%	Jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan layanan dibagi dengan jumlah proyeksi penderita ODGJ berat di wilayahnya dikali 100%
	Persentase penderita Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk usia ≥15 tahun yang mendapatkan layanan	%	Jumlah penderita GME pada penduduk usia ≥15 tahun yang mendapatkan layanan dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah estimasi GME pada penduduk usia ≥15 tahun di wilayahnya dikali 100%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	Persentase Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	%	Jumlah penyalahguna NAPZA baru yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di institusi penerima wajib lapor (IPWL)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)/KIS dibagi jumlah penduduk keseluruhan dikali 100%
	Jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan daerah	orang	Jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan daerah
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan	Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pemenuhan pelaksanaan intervensi PIS PK di Puskesmas	%	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Persentase Kab/kota yang melaporkan SPM	%	Jumlah Kab/kota yang melaporkn SPM/ Jumlah Kab/kota x100%
Pembinaan pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pembinaan	%	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Rujukan yang dilakukan pembinaan / Jumlah Faskes x100%
Verifikasi dan penilaian kelayakan puskesmas untuk registrasi	Validasi dan Evaluasi terhadap registrasi puskesmas yang sesuai dengan standar	Kab/Kota	Jumlah kabupaten kota yang melakukan validasi dan tindak lanjut terhadap registrasi puskesmas yang sesuai dengan standar
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Laporan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan atas pendampingan akreditasi bagi puskesmas dan klinik

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Penelitian Kesehatan
<b>Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi</b>	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	%	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Layanan dan Sarana Penunjang Integrasi Sistem Informasi Kesehatan / Jumlah Kab/Kota x 100%
Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah Laporan Data Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan Data Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan profil kesehatan tepat waktu	%	Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan profil kesehatan tepat waktu / jumlah kabupaten/kota x 100  Jadwal penerbitan : maksimal 30 Juni tiap tahun
	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi (kehumasan) melalui media online	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi (kehumasan)
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Paket	Jumlah pengadaan alat /perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi / jumlah RS kelas B pada faskes provinsi x 100%</b>
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi	RS	Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas kesehatan	Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi RSUD	%	Jumlah Puskesmas yang mendapat pendampingan/fasilitasi Akreditasi oleh Provinsi (kumulatif) / Jumlah Total Puskesmas x 100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
	Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota	%	Jumlah Puskesmas yang mendapat pendampingan/fasilitasi Akreditasi oleh Provinsi (kumulatif) / Jumlah Total Puskesmas x 100%
	Jumlah pendampingan akreditasi klinik	Klinik	Jumlah kumulatif pendampingan akreditasi klinik
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	Jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar/ Jumlah Puskesmas x 100%
<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Laporan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan	%	Jumlah pemenuhan SDM aparatur kesehatan / Jumlah kebutuhan SDM aparatur kesehatan x 100%
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya profil sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	Jumlah profil sumber daya manusia kesehatan yang disusun tahun dimaksud

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	Jumlah SDM Kesehatan Provinsi yang mendapatkan sertifikasi peningkatan kompetensi/ jumlah SDM Kesehatan x 100%
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang diterbitkan tahun berjalan	Sertifikat	Jumlah sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang diterbitkan tahun berjalan
	Laporan pelaksanaan Pendidikan/ Pelatihan/ Seminar pegawai	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Pendidikan/ Pelatihan/ Seminar pegawai
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk jabatan fungsional kesehatan	PAK	Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk jabatan fungsional kesehatan
	Persentase pegawai dinas kesehatan dengan nilai SKP minimal Baik	%	Persentase pegawai dinas kesehatan dengan nilai SKP minimal Baik/ jumlah pegawai x 100%
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar / Jumlah sarana distribusi farmasi cabang x 100%</b>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	<b>Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha</b>	%	<b>Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang telah memiliki sertifikat CDOB / Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) *100%</b>
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase pengawasan sarana distribusi alat kesehatan dan farmasi cabang pasca penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK	%	Jumlah Sarana distribusi cabang yang diawasi/ Jumlah Sarana Distribusi Cabang sampel * 100
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>	<b>Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>	%	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pembinaan / Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) *100%

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase pengawasan sarana UKOT pasca penerbitan Izin UKOT	%	Jumlah Sarana UKOT yang diawasi/ Jumlah Sarana UKOT sampel x 100%
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	Jumlah Kabupaten Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) / jumlah Kab/Kota x 100%
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	%	<b>Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi / Jumlah Rencana Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi x 100%</b>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan	%	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan dibagi jumlah seluruh Kab/Kota di Provinsi Kepri x 100 %
	Jumlah Pelaksanaan Kampanye Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kampanye Kesehatan yang dilaksanakan tahun berjalan
	Jumlah Posyandu yang menerapkan digitalisasi Posyandu	Posyandu	Jumlah Posyandu yang menerapkan digitalisasi Posyandu
	Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan Posyandu Aktif	%	Jumlah Kabupaten Kota yang melakukan pembinaan Posyandu Aktif dibagi Seluruh Kab/Kota di Provinsi Kepri x 100%
<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi / jumlah kab/kota x 100%</b>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Definisi Operasional
1	2	3	4
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dibagi Jumlah Kab/Kota di Provinsi Kepri x 100 %
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi / Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi yang direncanakan tahun berjalan x 100%</b>
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Laporan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

## DINAS KESEHATAN Provinsi Kepulauan Riau

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  
Gedung C2 Lantai 2 dan 3 Dompok Laut  
Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau



Subbag.   
@2021



[dinkes.kepriprov.go.id](http://dinkes.kepriprov.go.id)



[mail@dinkesprovkepri.org](mailto:mail@dinkesprovkepri.org)



Dinkes Kepri



[dinkesprovkepri](https://www.instagram.com/dinkesprovkepri)